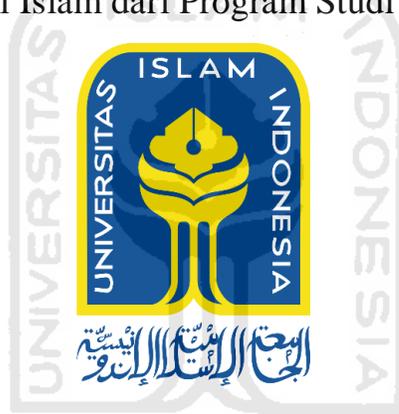


**ANALISIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD) PERSPEKTIF *ISLAMIC HUMAN
DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)* DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019**

*Analysis of The Local Budget (APBD) from Perspective Islamic
Human Development Index at Bangka Belitung Island Province in
2015-2019*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

AGNEVIANTY VIDA PALUPI

16423173

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agnevianty Vida Palupi

NIM : 16423173

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-
HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



Agnevianty Vida Palupi

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 November 2020
Nama : AGNEVIANTY VIDA PALUPI
Nomor Mahasiswa : 16423173
Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perspektif Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

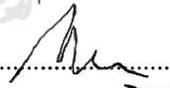
Penguji I

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

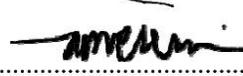
Penguji II

Junaidi Safitri, SEI, MEI

(.....)

Pembimbing

Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)

Yogyakarta, 4 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Safar 1442

12 Oktober 2020

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1201/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020/ 3 Muharam 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Agnevianty Vida Palupi

Nomor Induk Mahasiswa : 16423173

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Agnevianty Vida Palupi

NIM : 16423173

Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penelitian ini bukan hanya untuk dari saya pribadi melainkan saya persembahkan kepada beberapa pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian tulisan ini, tanpa dukungan mereka baik dukungan moral atau dukungan material maka tulisan ini tidak selesai. Oleh karena itu, hasil penelitian saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT karena karunia, nikmat dan rahmat-Nya lah tulisan ini bisa selesai tepat waktu.
2. Kedua orangtua, Ayahanda Andi Supriatna dan Ibunda Lili Mintarsih yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya, kalau bukan karena doa mustajab mereka maka penelitian ini akan sulit selesai, semoga mereka senantiasa dalam lindungan-Nya.
3. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Siti Achiria yang telah membimbing dan mendukung saya sehingga penelitian ini bisa selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Saudara saya Alizah Putri Rahmawati yang selalu memotivasi dan mendorong kakaknya untuk tidak menyerah sampai mencapai apa yang diinginkan. Termasuk tante Berti dan paman Yakob yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materiil.
5. Sahabat-sahabat saya Titan, Amara, Wafa, Sutik, Afifah, Dini, Erlina, Rahmatika, Ragil, Kintan, Maski, Fikri dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman KKN (Gadis, Maman, Dina, Gite, Lina, Surya dan Hamdan).
7. Para dosen Ekonomi Islam yang selalu memberikan motivasi untuk berkarya dan karena keihlasan mengajar mereka saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang InshaAllah berkah dan bermanfaat.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS.

Al Baqarah: 268)



ABSTRAK

ANALISIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019

AGNEVIANTY VIDA PALUPI

16423173

I-HDI merupakan singkatan dari *Islamic Human Development Index* yang digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. Dalam merumuskan I-HDI, digunakan pedoman tujuan-tujuan syariah atau *maqashid syariah* sebagai indikator kebutuhan manusia baik secara materi maupun spiritual. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada perspektif *Islamic Human Development Index* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Berdasarkan program pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka diperoleh hasil bahwa anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi sejalan dengan tujuan dari I-HDI. Anggaran tertinggi diduduki oleh anggaran pendidikan sebesar Rp. 1.992.004.398.446,7, anggaran kesehatan sebesar Rp. 1.286.288.322.029,7 dan anggaran ekonomi sebesar Rp. 832.817.386.502,8. Kemudian untuk hasil dari penghitungan I-HDI, setiap indeks mendapatkan nilai rata-rata selama lima tahun. Untuk *index ad Dien* sebesar 0.628, *index an Nafs* sebesar 0.759, *index al 'aql* sebesar 0.531, *index an Nasl* sebesar 1.873 dan *index al Maal* sebesar 2.67. Dari hasil tersebut terdapat beberapa aspek dalam eksekusi programnya belum dilakukan secara optimal. Sehingga berdampak pada minimnya angka I-HDI pada *index al aql* dan *index an Nafs*.

Kata Kunci: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Islamic Human Development Index, Index Pembangunan Manusia*

ABSTRACT

Analysis of The Local Budget (APBD) from Perspective Islamic Human Development Index at Bangka Belitung Island Province in 2015-2019

AGNEVIANTY VIDA PALUPI

16423173

I-HDI stands for Islamic Human Development Index which is used as a measuring tool for human development in an Islamic perspective. In formulating the I-HDI, the guidelines for the objectives of sharia or maqashid sharia are used as an indicator of human needs both materially and spiritually. The purpose of this study is to describe the budget for health, education and economics from the perspective of the Islamic Human Development Index in the Province of Bangka Belitung Islands in 2015-2019. The research method used is descriptive quantitative. Based on the regional government program of the Bangka Belitung Islands Province, the results show that the health, education and economic budgets are in line with the objectives of the I-HDI. The highest budget is occupied by the education budget of Rp. 1,992,004,398,446.7, health budget of Rp. 1,286,288,322,029.7 and an economic budget of Rp. 832,817,386,502.8. Then for the results of the I-HDI calculation, each index gets an average value for five years. The ad Dien index is 0.628, the an Nafs index is 0.759, the al 'aql index is 0.531, the Nasl index is 1.873 and the al Maal index is 2.67. From these results, there are several aspects in the execution of the program that have not been carried out optimally. So that it has an impact on the lack of I-HDI numbers on the al aql index and the Nafs index.

Keywords: The Local Budget (APBD), Islamic Human Development Index, Human Development Index

November 12, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang

bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati

adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ďad	Ď	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	A dan i

و	Fathah dan wau	Iu	A dan u
---	----------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي... ا... ..	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
ي... ..	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
و... ..	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طُفَالُ الأَرْوَضَةِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
رَةِ المَدِينَةِ المُنَوَّارَةِ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجِّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُعْمَ - nu''ima
الْبِرِّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	البَدِيعُ	- al-badi'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أَمِرْتُ	- umirtu
سَيِّئٌ	- syai'un	أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَلِلَّهِ

Wa auf al-kaila wal mīzān

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

Bismillāhi majrehā wa mursahā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-
Qur’ānu

Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ — Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ جَمِيعَا الْأَمْرِ — Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ — Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa tersanjungkan kehadiran Allah تعالى و سبحانه yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, yang telah menganugerahkan pikiran yang penuh dengan rahmat-Nya sehingga kita bisa melakukan berbagai aktifitas dan menunaikan setiap hajat hidup kita. Sholawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada nabi Muhammad ﷺ sang penakluk dunia, pembawa kedamaian dan membawa kita menuju gerbang Islam yang penuh dengan pengetahuan dan nikmat lainnya seperti saat ini.

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang merupakan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019”.

Sholawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad ﷺ beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Soya Sobaya., S.E.I., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Siti Achiria, SE, M.M, terima kasih atas waktu dan tenaga yang ibu berikan untuk bimbingan, masukan dan bantuannya selama ini, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membekali penyusun ilmu yang semoga menjadi berkah yang kemanfaatannya mengiringi penyusun sampai akhir hayat.
7. Staf Akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi maupun selama proses perkuliahan.
8. Keluarga saya, ibu, ayah saya serta adik saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya selama menjalankan proses perkuliahan hingga akhirnya bisa sampai pada titik ini.
9. Serta pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Dengan kerendahan hati, penyusun memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dihati. Hal itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penyusun. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, untuk penyusun khususnya. Semoga cita-cita mulia kita selalu mendapatkan ridho Allah dan selalu diberikan kemudahan di setiap urusan kita.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Penyusun



Agnevianty Vida Palupi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERTANYAA KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penyusun.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	21
C. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	38

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	38
C. Obyek Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Definisi Operasional Variabel.....	39
H. Instrumen Penelitian yang Digunakan.....	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	49
B. Pencapaian <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	55
C. Anggaran Kesehatan Perspektif <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI).....	73
D. Anggaran Pendidikan Perspektif <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI).....	77
E. Anggaran Ekonomi Perspektif <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI).....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	4
Tabel 1. 2	Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	5
Tabel 1. 3	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019.....	5
Tabel 2. 1	Daftar Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Sedang Diteliti.....	16
Tabel 2. 2	Indikator I-HDI.....	26
Tabel 2. 3	Indikator yang Diusulkan Dalam Kesejahteraan Holistik.....	27
Tabel 2. 4	Angka Maksimal dan Minimal dari Setiap Indikator I-HDI.....	27
Tabel 2. 5	Pengelompokan I-HDI.....	28
Tabel 3. 1	Data Indikator Usulan Penghitungan I-HDI.....	40
Tabel 3. 2	Indikator Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja (dalam milyar).....	42
Tabel 4. 1	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	50
Tabel 4. 2	Data Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.....	51
Tabel 4. 3	Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	52
Tabel 4. 4	Jumlah Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2015-2019.....	55
Tabel 4. 5	Hasil Penghitungan <i>Index ad Dien</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	55

Tabel 4. 6	Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 4. 7	Hasil Penghitungan <i>Index an Nafs</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 4. 8	Data Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	60
Tabel 4. 9	Hasil Penghitungan <i>Index al 'aql</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	60
Tabel 4. 10	Data Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019.....	62
Tabel 4. 11	Hasil Penghitungan <i>Index an Nasl</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	63
Tabel 4. 12	Data Pengeluaran Perkapita Selama Sebulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	65
Tabel 4. 13	Penghitungan I-HDI <i>Index al Maal</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	66
Tabel 4. 14	Hasil Pencapaian Index pada <i>Islamic Human Development Index (I-HDI)</i>	68
Tabel 4. 15	Pencapaian I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	68
Tabel 4. 16	Jumlah Anggaran Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam milyar).....	73
Tabel 4. 17	Jumlah anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar).....	77
Tabel 4. 18	Jumlah Anggaran Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar).....	80

Tabel 4.19	Jumlah anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar).....	84
Tabel 4.20	Analisis Anggaran Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Perspektif I-HDI.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 3.7	Penghitungan I-HDI.....	40
Gambar 4.1	Luas Wilayah Daratan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdiri dari perjuangan panjang yang diraih oleh gigihnya para pahlawan bangsa. Indonesia dibangun berdasarkan cita-cita luhur dan memiliki tujuan yang mulia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat ditingkatkan melalui pembangunan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Realisasi pembangunan nasional akan sulit, dikarenakan bentuk geografis wilayah Indonesia adalah Kepulauan yang mana sulit dijangkau jika pengelolaan kewenangan hanya dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, terkait dengan pemerataan pembangunan nasional pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini merupakan titik awal pengelolaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut gagasan sendiri berdasarkan potensi dan aspirasi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang pengelolaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat pembiayaan penyelenggara pembangunan daerah dengan mengalokasikan dana sebagai peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk alokasi belanja daerah.

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam mengelola kegiatan pemerintah daerah yang berhubungan dengan segala bentuk kekayaan suatu daerah, hal ini dituangkan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Yani, 2002). Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah wajib mengelola keuangan daerah berlandaskan asas-asas umum yang harus diacu sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini juga menyebutkan bahwasanya keuangan daerah memiliki ruang lingkup

yang terdiri dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, pendapatan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat APBD merupakan rancangan keuangan suatu daerah dalam satu tahun kedepan (Andriana, 2008). APBD dapat dijadikan sebagai representasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga dalam penyusunan APBD secara efektif diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang secara khusus telah menentukan landasan yang jelas dalam penertiban dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Adapun komponen dari APBD ini adalah sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja daerah secara adil dan merata supaya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Luaran dari pelayanan publik yang baik akan memmanifestasikan pembangunan manusia dengan efektif. Kebijakan pemerintah dalam hal anggaran haruslah dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Pembangunan selalu menjadi berita hangat karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan dalam suatu negara efektif apabila kesejahteraan masyarakat meningkat diiringi beberapa indikator yang telah ditetapkan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur oleh Index Pembangunan Manusia. Index Pembangunan Manusia merupakan suatu parameter berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup secara terukur dan representatif (Ghazali, 2014). Index Pembangunan Manusia pertama kali dipublikasikan UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui Human Development Report pada tahun 1996. Index Pembangunan Manusia dicetuskan untuk melihat seberapa besar efektivitas program dan kerja pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Index Pembangunan Manusia dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu harapan hidup, pendidikan dan terjangkaunya layanan sosial untuk masyarakat (UNDP, 2016).

Pada tahun 2019 IPM Indonesia berada di urutan ke 111 dari 189 negara dengan memperoleh angka harapan hidup pada usia 71,5 tahun yang artinya Indonesia sudah berada di posisi *high human development* (Human Development Report 2019). Berdasarkan data tersebut Indonesia dalam 3 tahun terakhir mampu merubah statusnya dari *medium human development* ke *high human development*. Padahal pembangunan manusia dikatakan berhasil apabila negara dapat mengatasi permasalahan dasar di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2008).

Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang terkenal dengan sebutan negeri Serumpun Sebalai. Provinsi ini ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 mengenai Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa. Untuk sektor pertambangan, komoditi yang diunggulkan adalah timah sedangkan komoditi penunjang lainnya adalah kaolin. Pada sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, ubi jalar dan ubi kayu, sedangkan dari sektor perkebunan komoditi unggulan diduduki oleh kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, karet dan lada (KESBANGPOL, 2020).

Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang memadai, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat pada tahun 2018. Penyebabnya karena terjadinya penyusutan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98% (yoy) dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,58% (yoy) (Unit Advisory Ekonomi, 2018). Masyarakat sangat bergantung terhadap hasil pertambangan (timah), sehingga ini berdampak terhadap kelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus diminimalisir dengan upaya peningkatan peran dan potensi ekonomi, yang dapat dilakukan dengan penekanan terhadap urgensi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan. Ini menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia dalam suatu daerah memiliki andil besar dalam menentukan

keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya. Tidak hanya itu, berdasarkan data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat 25 selama lima tahun berturut-turut. Berikut data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 1.1 Data Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama sekolah	7.46	7.62	7.78	7.84	7.98
2.	Harapan lama sekolah	11.60	11.71	11.83	11.87	11.94

Sumber: (BPS Indonesia, 2020) disesuaikan.

Berdasarkan tabel 1.1 yg telah dipaparkan, untuk 5 tahun terakhir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata lama sekolah berada di angka 7.73 tahun sedangkan pada data Harapan Lama Sekolah diketahui rata-rata 5 tahun terakhir adalah 11.79 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mayoritasnya lulusan Sekolah Dasar. Permasalahan lainpun tidak cukup hanya disitu, rendahnya angka harapan hidup yang berada dibawah rata-rata angka harapan hidup se-Indonesia yang hanya mencapai 69,95 pada tahun 2017 menjadi prioritas tambahan untuk pemerintah (BPS Indonesia, Angka Harapan Hidup di Indonesia, 2020).

Tabel 1.2 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	69.88	69.92	69.95	70.18	70.50

Sumber: (BPS, 2020) disesuaikan.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

Wilayah	Index Pembangunan Manusia				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bangka	70.03	70.43	71.09	71.80	72.39
Kab. Belitung	70.29	70.81	70.93	71.70	72.46
Kab. Bangka Barat	67.23	67.60	67.94	68.68	69.05
Kab. Bangka Tengah	68.66	68.76	68.99	69.52	70.33
Kab. Bangka Selatan	63.89	64.57	65.02	65.98	66.54
Kab. Belitung Timur	68.83	69.30	69.57	70.22	70.84
Kota Pangkalpinang	76.61	76.73	76.86	77.43	77.97

Sumber data: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat adanya peningkatan setiap tahun yang berarti perkembangan pengelolaan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan cukup baik. Tetapi, belum tentu tingginya pencapaian indeks pembangunan manusia selaras dengan tingginya *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai provinsi dengan 80% mayoritas penduduk menganut agama islam (Kemenag, 2018), pembangunan manusia

mempunyai tujuan utama untuk mensejahterakan manusia dari aspek materil maupun aspek spiritual. Islam telah melihat betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mengantarkannya kepada kemaslahatan. Selain itu, Islam sebagai jalan kehidupan tentunya mempunyai ukuran pembangunan yang tidak hanya sebagai pemenuhan unsur materi semata, namun juga dilengkapi dengan ukuran syariah yang tentunya memiliki indikator-indikator tersebut menjadi lebih sempurna. Dalam hal ini kebijakan pemerintah pada pengelolaan daerah terutama perancangan anggaran haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Islamic-Human Development Index (I-HDI) merupakan konsep dan teori pembangunan manusia yang didasari pada perspektif islam. Pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam *Maqashid Syariah* dijadikan sebagai teori untuk mengembangkan I-HDI. I-HDI diukur berdasarkan lima dimensi menurut Imam asy-Syatibi yang terdiri dari agama (*Dien*), jiwa (*Nafs*), intelektual (*aql*), keturunan (*Nasl*) dan Harta (*Maal*). Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi supaya manusia dapat mencapai tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Apabila salah satu dari kebutuhan lima dimensi tersebut tidak terpenuhi atau sengaja tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (P3EI, 2012).

Oleh karena itu, kompleksnya beberapa permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah setempat, membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memiliki strategi perancangan dengan unsur pemenuhan kebutuhan dari aspek materil hingga spiritual melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belum tentu ingginya pencapaian indeks pembangunan manusia selaras dengan tingginya *Islamic-Human Development Index (I-HDI)*. *Islamic Human Development Index* mempunyai indikator untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara penuh. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perspektif Islamic**

Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana anggaran bidang kesehatan perspektif *Islamic Human Development Index* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?
2. Bagaimana anggaran bidang pendidikan erspektif *Islamic Human Development Index* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?
3. Bagaimana anggaran bidang ekonomi perspektif *Islamic Human Development Index* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang kesehatan perspektif *Islamic Human Development Index (I-HDI)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019
2. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang pendidikan perspektif *Islamic Human Development Index (I-HDI)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019
3. Menganalisis dan mendeskripsikan anggaran bidang ekonomi perspektif *Islamic Human Development Index (I-HDI)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan kepada penyusun dan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah serta menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi dampak positif bagi pemerintah daerah dan wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam memprioritaskan alokasi dana supaya memberikan efek yang baik pada kesejahteraan masyarakat.

Serta penelitian ini juga dijadikan sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia maupun instansi lain dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penyusunan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan, serta untuk mempermudah analisa materi dan penulisan penelitian ini maka penyusun menjelaskan dalam sistematika penulisan. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab, yang dimana setiap sub bab mempunyai batasan masing- masing dan saling berhubungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi di Provinsi Bangka Belitung dan mendeskripsikan apa saja permasalahan yang ada di wilayah tersebut sehingga menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat. Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan permasalahan yang akan dijadikan dasar dan tujuan penelitian ini dibuat.

BAB II Landasan Teori dalam bab ini akan menguraikan telaah pustaka dan landasan teori, yang mana membahas mengenai penjabaran teori-teori mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Bab ini juga membahas landasan teori, yang mana didalamnya berisi tentang teori analisis, kemudian pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) secara keseluruhan.

BAB III Metode Penelitian dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga memaparkan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang semuanya dapat mendukung kelancaran penulis dalam penulisan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini penyusun menguraikan secara rinci mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari pengumpulan data yang ada penulis dapat mendeskripsikan data tersebut menjadi sebuah narasi yang jelas dan dapat dipahami. Adapun analisis yang tertuang pada bab IV adalah: Pertama : Profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didalamnya menjelaskan sejarah, luas wilayah, keadaan sosial, ekonomi dan lainnya. Kedua : Pencapaian I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019, yang didalamnya dijelaskan mengenai hasil dari seluruh *index* yang terdapat di *Islamic*

Human Development Index (I-HDI) dan hasil penghitungan I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 hingga 2019. Ketiga: Anggaran kesehatan perspektif I-HDI, dalam sub bab ini dibahas mengenai jumlah anggaran kesehatan dari tahun 2015-2019 dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan *Islamic Human Development Index*. Empat: Anggaran pendidikan perspektif I-HDI, dalam sub bab ini dibahas mengenai jumlah anggaran pendidikan dari tahun 2015-2019 dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan *Islamic Human Development Index*. Kelima: Anggaran ekonomi perspektif I-HDI, dalam sub bab ini dibahas mengenai jumlah anggaran ekonomi dari tahun 2015-2019 dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan *Islamic Human Development Index*.

BAB V Penutup dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dalam bab ini dijabarkan mengenai hasil dari keseluruhan yang penyusun lakukan antara lain mengenai anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Serta saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sudah banyak dilakukan, meskipun tujuan yang diteliti dari masing-masing penelitian berbeda. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang mendukung dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa jurnal ilmiah (internasional/nasional), prosiding, disertasi/tesis, buku primer serta sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan dalam paragraf dibawah ini.

Pertama, dari penelitian yang ditulis oleh Firman Muhammad Arif (2019) dengan judul penelitian "**Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo**". Penelitian ini membahas Anggaran belanja daerah berbasis *maqasid al syari'ah* dengan fokus masalah, realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan eksploratif, menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis dan teologi kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan kehidupan masyarakat. Realisasi anggaran penyerapan anggaran dilakukan secara besar-besaran sehingga ketergantungan dari tingkat pusat dan provinsi dapat diminimalisir. Penilaian pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran telah mencerminkan kinerja pemerintah setiap tahun. Realisasi pengeluaran anggaran daerah ini berdampak luas pada standar kehidupan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maya Masita Septiarani dan Sri Herianingrum (2017) dengan judul **”Analisis I-HDI (*Islamic Human Development Index*) di Jawa Timur”**. Penelitian ini berfokus pada pencapaian pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2010-2014 yang diukur berdasarkan I-HDI (*Islamic-Human Development Index*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2010-2014 yang menjadi objek penelitian adalah 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan I-HDI dan HDI. I-HDI berada di peringkat rendah sedangkan hasil perhitungan HDI berada di peringkat atas. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bermakna bahwa perhitungan HDI sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah atas sedangkan hasil perhitungan I-HDI masuk dalam kategori pembangunan menengah kebawah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rukiah & Saparuddin Siregar (2019) dengan judul **”Interactions and Contributions Between Islamic Human Development Index, Economics Growth, Fiscal Policy and Demographics In Indonesian Provinces: Panel Vector Autoregression (P-Var) Analisis”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi dan kontribusi antara I-HDI, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan populasi provinsi di Indonesia. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan melalui pendekatan *Panel Vector Autoregression* (P-Var) dimana setiap variabel dapat bertindak sebagai variabel endogen dan eksogen. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari hubungan I-HDI dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi di setiap provinsi tidak memiliki dampak besar pada peningkatan I-HDI. Selain itu ada efek negatif antara I-HDI dengan kebijakan fiskal dalam pendidikan, artinya pembangunan ekonomi belum mampu

berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan populasi yang produktif masih menjadi beban bagi ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Yufika Furi Larassita dkk. (2015) dengan judul **"Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014"**. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar anggaran pemerintah terhadap peningkatan Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan infrastruktur cukup signifikan mempengaruhi peningkatan Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Rukiah dkk. (2019) dengan judul **"Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah)"**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Index Pembangunan Manusia dengan pendekatan Maqashid Syariah. Sampel penelitian ini menggunakan 33 provinsi di Indonesia dengan metode kuantitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah hampir 80% provinsi yang berada pada *Islamic Human Development Index* terbilang rendah, kemudian pembangunan manusia di Indonesia dengan pendekatan *Maqashid Syariah* belum berhasil sepenuhnya. Faktor dominan yang mempengaruhi IHDI di Indonesia adalah Kesejahteraan Non Material (NMW). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan dan strategi dalam pencapaian kesejahteraan jauh dari kepatuhan syariah.

Keenam, penelitian ini berfokus pada pengukuran index yang lebih tepat antara *Human Development Index* atau *Index Maqashid Syariah* untuk mengukur pencapaian akhir keberadaan manusia yaitu kebahagiaan. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Hajria dan Wahyu Jatmiko (2015) dengan judul **"Between Sharia Maqasid Index and**

Human Development Index: Which One is Happier?”. Penelitian ini menguji hubungan antara index pembangunan, yaitu IPM dari UNDP dan Index Maqashid Syariah terhadap kebahagiaan negara-negara OKI. Melalui analisis regresi deskriptif menemukan hasil bahwa adanya hubungan positif antara Index Maqashid Syariah dengan kepuasan hidup. Index Maqashid Syariah adalah langkah yang lebih tepat untuk menjadi tolak ukur untuk membandingkan pembangunan di antara negara-negara khususnya negara muslim.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza dkk (2018) dengan judul **”The Effect of Islamic Human Development Index on Poverty Level in Bireuen District Period 2000-2017”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)* pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen periode 2000-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Kabupaten Bireuen yang dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan berdasarkan index, *ad-Dien* menunjukkan bahwa tingkat kejahatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan *an-Nafs* menunjukkan bahwa harapan hidup tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, *'aql* menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki efek negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan *an Nasl* menunjukkan bahwa tingkat kelahiran tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan serta pengeluaran perkapita tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh As'ad Bukhari (2018) dengan judul **”Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi”**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa pengaruh Islam dan pembangunan manusia di era globalisasi. Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan manusia yang perceptif harus melihat 4 hal pokok, yaitu peningkatan produktivitas penduduk, pemerataan kesempatan untuk setiap penduduk, kesinambungan untuk generasi mendatang, dan pemberdayaan masyarakat serta keaktifan masyarakat sipil juga diperlukan dalam proses pembangunan negara.

Berdasarkan beberapa sumber penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian terkait pengaruh APBD terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman Muhammad Arif (2019). Tetapi, penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada *index ad dien* adalah rasio zakat, *index an nafs* menggunakan indikator angka harapan hidup, *index al aql* menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, *index an nafs* menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, *index al maal* menggunakan indikator pendapatan perkapita. Oleh karena itu, untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah dipaparkan. Berikut tabel perbedaan penelitian pada telaah pustaka dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Daftar Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Sedang Diteliti

No.	Judul, Penyusun dan Tahun	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1.	Anggaran Belanja Daerah Berbasis <i>Maqasid al Syari'ah:</i> Analisis Realisasi	Penelitian ini membahas Anggaran belanja daerah berbasis <i>maqasid al syari'ah</i> dengan fokus masalah, realitas pemberdayaan anggaran belanja	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang

	<p>Anggaran Kota Palopo, Firman Muhammad Arif (2019)</p>	<p>pemerintah dan realisasi pemanfaatannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan eksploratif, menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis dan teologi kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan kehidupan masyarakat.</p>	<p>digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.</p>
2.	<p>Analisis I-HDI (<i>Islamic Human Development Index</i>) di Jawa Timur, Maya Masita Septiarani dan Sri</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pencapaian pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2010-2014 yang diukur berdasarkan I-HDI (<i>Islamic-Human Development Index</i>).</p>	<p>Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif</p>

	Herianingrum (2017).	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif.	deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.
3.	Interactions and Contributions Between Islamic Human Development Index, Economics Growth, Fiscal Policy and Demographics In Indonesian Provinces: Panel Vector	Pada penelitian ini menganalisis interaksi dan kontribusi antara I-HDI, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan populasi provinsi di Indonesia.	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka

	Autoregression (P-Var) Analisis, Rukiah & Saparuddin Siregar (2019).		harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.
4.	Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014, Yufika Furi Larassita dkk (2015).	Pada jurnal ini mengungkapkan seberapa besar anggaran pemerintah terhadap peningkatan Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember.	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i>

			menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.
5.	Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah), Rukiah dkk. (2019).	Penelitian ini menganalisis Index Pembangunan Manusia dengan pendekatan Maqashid Syariah. Tetapi sampel penelitian ini menggunakan 33 provinsi di Indonesia dengan metode kuantitatif deskriptif.	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.

6.	Between Sharia Maqasid Index and Human Development Index: Which One is Happier? Wahyu Jatmiko (2015).	Pada penelitian ini berusaha membandingkan antara Index <i>Maqashid Syariah</i> dengan <i>Human Development Index</i> mana yang lebih tepat untuk menjadi tolak ukur bagi negara-negara khususnya negara muslim.	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.
7.	The Effect of Islamic Human Development Index on Poverty Level in	Penelitian ini mengungkapkan bagaimana pengaruh <i>Islamic Human Development Index</i> (I-	Sedangkan pada penelitian yang ingin ditulis melihat bagaimana APBD pada perspektif <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI) di Provinsi Kepulauan

	Bireuen District Period 2000-2017, Muhammad Reza dkk (2018).	HDI) pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen periode 2000-2017. Penelitian ini juga membandingkan antar (I-HDI) saling berhubungan atau tidak dengan kemiskinan.	Bangka Belitung tahun 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif.
8.	Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi, As'ad Bukhari (2018).	Perbedaan pada penelitian terletak pada tujuannya yang ingin melihat seperti apa pengaruh Islam dan pembangunan manusia di era globalisasi saat ini, apakah masih relevan atau tidak.	Penelitian yang ingin dibuat oleh penulis ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan APBD pada perspektif I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penghitungan I-HDI indikator yang digunakan pada <i>index ad dien</i> adalah rasio zakat, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator angka harapan hidup, <i>index al aql</i> menggunakan indikator gabungan dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, <i>index an nafs</i> menggunakan indikator

			gabungan dari Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi, <i>index al maal</i> menggunakan indikator pendapatan perkapita.
--	--	--	---

B. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka teori yang akan dipaparkan dalam bagian ini yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD disusun dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kemampuan pendapatan daerah yang ditentukan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sugianto, 2008). Pengertian APBD tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah sebagai wakil masyarakat yang memiliki mandat dari rakyat harus direalisasikan, yang mana dalam merealisasikan mandat tersebut membutuhkan biaya dengan jumlah banyak. Maka dari itu APBD dapat dijadikan sebagai proyeksi kebutuhan masyarakat setempat hingga akhir tahun. Anggaran dibuat sebagai cerminan kualitas dari kinerja pemerintah secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2002):

- a. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.

- b. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
- c. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Berikut beberapa pengertian APBD, antara lain:

- a. Pengertian APBD menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
- b. Mamesah (1995) memberi pengertian bahwa APBD adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahunan anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.
- c. Halim (2002) menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran”.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sesuai kebutuhan pada wilayah itu sendiri dengan diletakkan sesuai bidang kebutuhannya. Dalam hal ini APBD yang akan diteliti adalah anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penggunaan tiga bidang

anggaran tersebut dikarenakan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan anggaran bidang tersebut.

Anggaran Kesehatan merupakan salah satu bidang yang menyokong pembangunan manusia di setiap wilayah. Tujuan pembangunan pada bidang kesehatan akan berjalan lancar dengan adanya dukungan pembiayaan. Pembiayaan yang diperlukan harus dianggarkan sesuai kebutuhan kesehatan. Anggaran kesehatan memiliki tujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan secara adil, didistribusikan secara merata dan termanfaatkan secara baik guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek jasmani. Urgensi anggaran kesehatan pada APBD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sadi, 2015).

Pendidikan merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945. Pendidikan merupakan kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat diaplikasikan untuk bekal di masa yang akan datang (Neolaka, 2017). Urgensi dari pendidikan sendiri tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sangat penting bagi suatu negara karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Semakin baik SDM pada wilayah tertentu maka tinggi pula tingkat pendidikannya. Untuk menyokong kegiatan pendidikan sehingga dapat mencerdaskan bangsa dapat dilakukan dengan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan wadah bagi terlaksananya kegiatan pada bidang pendidikan.

Dalam hal ini, pembiayaan pada bidang pendidikan harus dianggarkan terlebih dahulu. Anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, hal ini tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4. Anggaran pendidikan juga dikategorikan menjadi dua, yaitu Anggaran Fungsi Pendidikan dan Anggaran Urusan Pendidikan (kemdikbud, 2020).

Anggaran ekonomi dimaksudkan sebagai kumpulan anggaran-anggaran yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Anggaran ekonomi dibuat sebagai penunjang pembangunan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi merupakan kegiatan dasar untuk memenuhi kebutuhan setiap insan manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus dialokasikan sesuai kebutuhan yang paling penting.

2. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mempunyai interpretasi sendiri akan pembangunan manusia yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan. I-HDI merupakan singkatan dari *Islamic Human Development Index* digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. I-HDI digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tingkat kesejahteraan manusia berdasarkan kebutuhan dasar yang terpenuhi, sehingga manusia mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. Untuk mengukur indeks pembangunan manusia dalam perspektif Islam maka dibutuhkan indikator khusus sebagai penopang jenis-jenis kebutuhan manusia. Dalam merumuskan I-HDI, digunakan pedoman tujuan-tujuan syariah atau *maqashid syariah* sebagai indikator kebutuhan manusia baik secara materi maupun spiritual. *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai dasar pemikiran syariah yang mencakup semua kebutuhan manusia yang dirancang untuk melindungi kepentingan umat manusia dalam semua bagian dan aspek

kehidupan. Menurut Al-Ghazali *maqashid syariah* diinterpretasikan kedalam lima kebutuhan manusia yaitu, menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz Nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nabs*) dan menjaga harta (*hifz mal*) (Ariza, 2012).

Tabel 2.2 Indikator I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Index Dimensi
<i>Maslahah</i>	<i>Hifzu ad- Dien</i>	<i>Index ad-Dien</i>
	<i>Hifzu an- Nafs</i>	<i>Index an-Nafs</i>
	<i>Hifzu al- 'Aql</i>	<i>Index al- 'aql</i>
	<i>Hifdzu an-Nasl</i>	<i>Index an-Nasl</i>
	<i>Hifdzu al-Mal</i>	<i>Index al-Mal</i>

Sumber: (Anto, 2011), disesuaikan.

I-HDI terbagi menjadi lima dimensi dalam dua klasifikasi yang berbeda yaitu *non material welfare* yang terdiri dari dimensi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan serta *material welfare* yang terdiri dari menjaga harta (*Hifzu al-Mal*). Penjelasan indikator yang diusulkan oleh Hendri Anto dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator yang Diusulkan Dalam Kesejahteraan Holistik

Klasifikasi	Dimensi	Index Dimensi	Indikator Usulan
<i>Non Material Welfare</i>	<i>Hifzu ad-Dien</i>	Index ad-Dien	1. Angka Kriminalitas
	<i>Hifzu an-Nafs</i>	Index an-Nafs	1. Angka Harapan Hidup
	<i>Hifzu al- 'aql</i>	Index al- 'aql	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah

	<i>Hifzu an-Nasl</i>	Index an-Nasl	1. Angka Kelahiran Total 2. Angka Kematian Bayi
<i>Material welfare</i>	<i>Hifzu al-Mal</i>	Index al-Mal	1. Pengeluaran perkapita (PPP Rupiah)

Sumber: (Anto, 2011), disesuaikan.

Untuk menghitung *index* dari masing-masing dimensi yang ada di I-HDI, digunakan batas maksimal dan minimal yang akan dipaparkan pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Angka Maksimal dan Minimal dari Setiap Indikator I-HDI

Dimensi	Indikator	Angka Maksimal	Angka Minimal	Keterangan
ad-Dien	Rasio Zakat	Angka Maksimal	Angka Minimal	-
an-Nafs	Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
al-‘Aql	Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
	Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
an-Nasl	Angka Kelahiran Total	2.1%	1.5%	Standar BKKBN
	Angka Kematian Bayi	70	12	Standar SDG’s 2030
al-Mal	Pengeluaran per Kapita	18563	13374	Standar BPS

Sumber: BPS, UNDP, SDG’s & BKKBN disesuaikan.

Tabel 2. 4 memaparkan angka maksimal dan minimal dari beberapa indikator I-HDI yang digunakan untuk mengukur I-HDI. Angka maksimal dan minimal yang telah dipaparkan pada table tersebut disesuaikan dengan standar, baik standar nasional maupun standar internasional.

Tabel 2. 4 Pengelompokan I-HDI

Capaian	Kategori
$I-HDI < 60$	I-HDI rendah
$60 \leq I-HDI < 70$	I-HDI sedang
$70 \leq I-HDI < 80$	I-HDI tinggi
$I-HDI \geq 80$	I-HDI sangat tinggi

Dengan adanya tabel pengelompokan I-HDI maka dapat ditentukan suatu daerah memiliki tingkat I-HDI pada jenis kategori yang mana.

Berikut penjelasan mengenai komponen I-HDI dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* Asy Syatibi:

1. Menjaga Agama (*Hifzu ad-Dien*)

Islam selalu mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah dalam firman-firman-Nya. Baik serta buruknya kehidupan tidak selalu diukur dari indikator-indikator khusus melainkan dari sejauh mana seorang manusia dapat berpegang teguh pada keimanan (P3EI, 2012). Maka dari itu, manusia membutuhkan suatu pedoman sebagai pegangan hidup untuk melakukan kebenaran yaitu agama (*Dien*).

Menjaga agama dapat diartikan sebagai cara kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa untuk senantiasa menghormati peraturan-peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Menjaga

agama didapatkan dengan cara melaksanakan berbagai macam ibadah. Akidah, ibadah dan muamalat dapat dilaksanakan sebagai perwujudan dari terpeliharanya agama dengan niat mengelola hubungan antara manusia dan Allah serta di ruang lingkup umat islam sendiri (Ibrahim, 2006). Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan menjaga agama (*hifz ad-Dien*) yaitu.

QS. Al Baqarah (2): 43 Tentang Perintah Shalat dan Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*

QS. Al Baqarah (2): 183 Tentang Perintah Puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
١٨٣

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”*

QS. Ali Imran (3): 104 Tentang Perintah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang*

ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

QS. Ali Imran (3):97 Tentang Perintah Haji

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, dapat ditelaah bahwasannya pemeliharaan terhadap agama merupakan prioritas atau pondasi dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah. Ayat-ayat diatas juga berisi mengenai perintah untuk mengamalkan semua keimanan yang berarti pemeliharaan jiwa merupakan ajaran fundamental dan diletakkan sebagai prioritas dan pondasi dalam *Islamic Human Development Index I-HDI*.

Dalam I-HDI terdapat indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index ad-Dien*. *Index ad-Dien* adalah index yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur dimensi agama, meliputi *aqidah*, shalat, zakat, puasa, haji, keadilan dan jihad. Dalam penelitian ini *index ad-Dien* dapat dihitung berdasarkan indikator yang berhubungan dengan *index ad-Dien*, yaitu rasio zakat yang membutuhkan data penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat.

2. Menjaga Jiwa (*hifzu an-Nafs*)

Menjaga jiwa didefinisikan sebagai cara untuk memastikan eksistensi, dan pengemban kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan spiritual, kebutuhan dasar dan kebutuhan moral, kebutuhan social dan kebutuhan perlindungan dari ancaman. Terdapat tingkat kepentingan dari menjaga jiwa, yaitu : (1) Menjaga jiwa berdasarkan *dharuriyyat*, contohnya adalah kebutuhan pokok berupa makan untuk bertahan hidup. (2) Menjaga jiwa berdasarkan *hajiyyat* yaitu diperbolehkannya memenuhi kebutuhan seperti berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Tingkatan *hajiyyat* tidak akan mengancam kehidupan manusia karena sifatnya sekunder. (3) Menjaga jiwa berdasarkan tingkatan *tahsiniyyat*, contohnya yaitu ditetapkannya tata cara makan dan minum. Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifz Nafs* yaitu.

QS. Al Mu'minin (23): 51 Perintah Memakan Makanan yang Baik

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

QS. Al Baqarah (2): 173 Larangan Memakan Makanan Haram

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembah) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kedua ayat ini menafsirkan bahwasanya kita sebagai manusia dalam menjalani hidup harus mengamalkan amal-amal saleh yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT dan menggabungkan semua kebaikan tersebut, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Dengan menjalankan perintah yang telah Allah SWT tetapkan pada ayat-ayat ini maka, memakan makanan dengan baik merupakan pembuktian diri bahwasannya perintah tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan pada diri manusia.

Hal ini berhubungan dengan implementasi dalam menjaga jiwa yang dapat dihitung melalui *index an-Nafs*. *Index an-Nafs* adalah suatu index yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur dimensi kebaikan fisik manusia atau kesehatan. *Index an-Nafs* dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup.

3. Menjaga Akal (*Hifzu al-'Aql*)

Kehidupan manusia selalu diiringi dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu, Islam dengan tegas memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Berikut ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifz al-'aql*:

QS. Al Mujaadilah (58): 11 Keuntungan Orang yang Memiliki Ilmu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan di atas, dapat ditafsirkan bahwa dalam ayat ini kita sebagai makhluk hidup yang mempunyai derajat yang lebih dianjurkan dalam menuntut ilmu guna memberi kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu. Hal ini berhubungan dengan menjaga akal pada I-HDI, terdapat indikator yang bisa digunakan untuk membentuk *index al-'aql*. *Index al-'aql* sendiri merupakan index yang dijadikan acuan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada penelitian ini *index al-'aql* dapat diukur melalui data Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

4. Menjaga Keturunan (*Hifzu an-Nasl*)

Berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup termasuk manusia untuk memelihara kontinuitas kehidupan. Memelihara kontinuitas kehidupan berarti menjaga keturunan untuk generasi yang akan datang. Menjaga keturunan dapat ditingkatkan menjadi 3 tingkatan, yaitu: (1) Menjaga keturunan berdasarkan *dharuriyyat* contohnya seperti perintah untuk menikah dan diharamkannya berzina. (2) Menjaga keturunan berdasarkan *hajiyyat*, contohnya seperti ditentukannya menyebutkan mahar bagi suami pada saat menikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) Menjaga keturunan berdasarkan *tahsiniyyat* contohnya seperti disyariatkannya *khitbah* (tunangan) dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan sehingga tidak akan mengancam eksistensi keturunan serta tidak menyulitkan bagi orang yang melakukan perkawinan. Di bawah ini dipaparkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifzu an-Nasl* diantaranya sebagai berikut:

QS. an-Nuur (24): 32 Perintah untuk Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui."

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan di atas, dapat ditafsirkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan ibadah yang mana juga pemenuhan kebutuhan setiap manusia ketika mereka siap. Menikah merupakan aktivitas awal untuk melestarikan keturunan dan mencegah kepunahan. Hal ini selaras dengan pengaplikasian dalam menjaga keturunan pada I-HDI. Dalam I-HDI terdapat indikator yang bisa digunakan untuk membentuk *index Nasl* yaitu data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

5. Menjaga Harta (*Hifzu al-Maal*)

Harta merupakan suatu hal atau benda yang memiliki nilai. Menjaga harta juga digambarkan sebagai penunjang keempat komponen unsur *Islamic Human Development Index* (I-HDI) supaya berjalan dengan baik. Manusia mempunyai hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan tetapi harus diiringi dengan fungsi sosial seperti memberikan sebagian harta tersebut kepada orang lain ataupun masyarakat (Katmas, 2018). Dibawah ini dipaparkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *hifz al-maal* diantaranya sebagai berikut.

QS. At Taubah (9): 105 Perintah untuk Bekerja

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kami apa yang telah kamu kerjakan."*

QS. al- Anfaal (8): 28 Harta Sebagai Ujian Keimanan

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: *"Dan ketauhilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."*

QS. At-Taubah (9): 41 Harta Sebagai Bekal Ibadah

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٤١

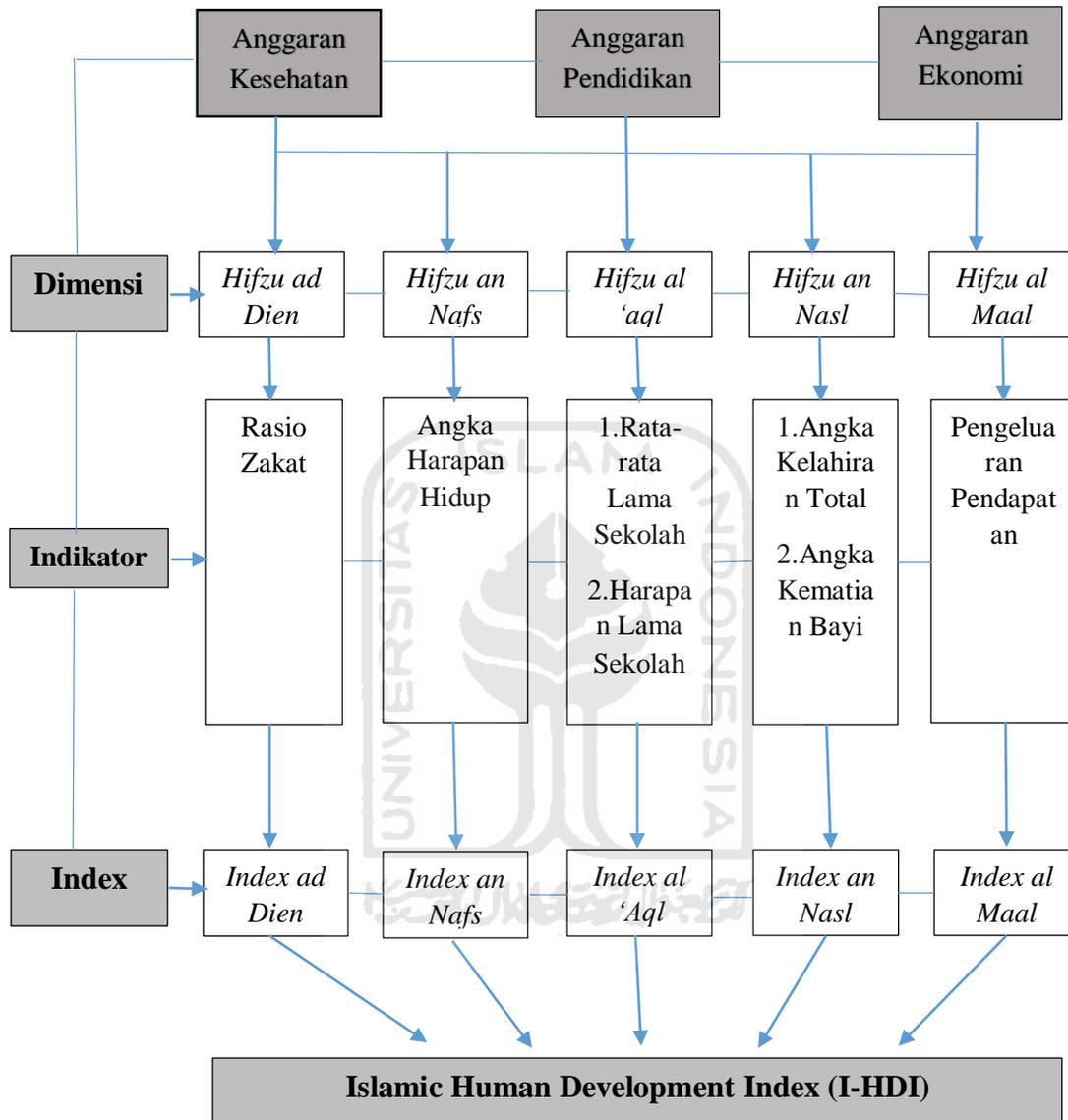
Artinya: *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikianlah itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui."*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa menjaga harta merupakan pemenuhan kebutuhan yang pokok untuk menjalani kehidupan. Memperoleh harta juga harus dihasilkan dengan mengerjakan perbuatan yang baik. Dalam hal ini berhubungan dengan I-HDI. Terdapat indikator yang bisa digunakan untuk membentuk *index Maal* yaitu data pengeluaran perkapita.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar pengembangan setiap konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan dasar dari kerangka kerja serta proses yang diperlukan pada perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian diawali dengan menentukan instrumen penelitian, menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data serta menganalisis data (Nasrudin, 2019).

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang ditentukan terhadap suatu penentu yang bersifat akurat (Martono, 2010).

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Bangka Belitung merupakan daerah dengan jumlah penduduk mayoritas memeluk agama islam. Dilansir dari data yang dipublikasi oleh kemenag data penduduk yang memeluk agama islam sebesar 1.233.654 jiwa (Kemenag, 2018). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2015 hingga 2019 (BPS Babel, 2020). Alasan pemilihan tahun yang digunakan supaya mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan keadaan sekarang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu hal yang dijadikan penelitian, atau arti lain merupakan variabel yang diteliti (Anshori & Iswati, 2009). Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 melalui perspektif I-HDI.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan gabungan dari keseluruhan komponen-komponen pada penelitian (Harinaldi, 2005). Dapat dikatakan populasi mempunyai lingkup lebih luas daripada sampel, dalam penelitian ini yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh data *time series* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang berisi data dengan lingkup kecil dan lebih spesifik (Harinaldi, 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah data *time series* setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu sebanyak 5 sampel *index ad Dien*, *index an Nafs*, *index al 'aql*, *indeks an Nasl* dan *index al Maal*.

E. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder dengan periode 2015-2019. Adapun data diperoleh dari Instansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik, BAZNAS, Website Resmi Pemerintah, Jurnal, Buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang masuk relevan dengan variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data-data dari indikator I-HDI.

F. Teknik Pengumpulan Data

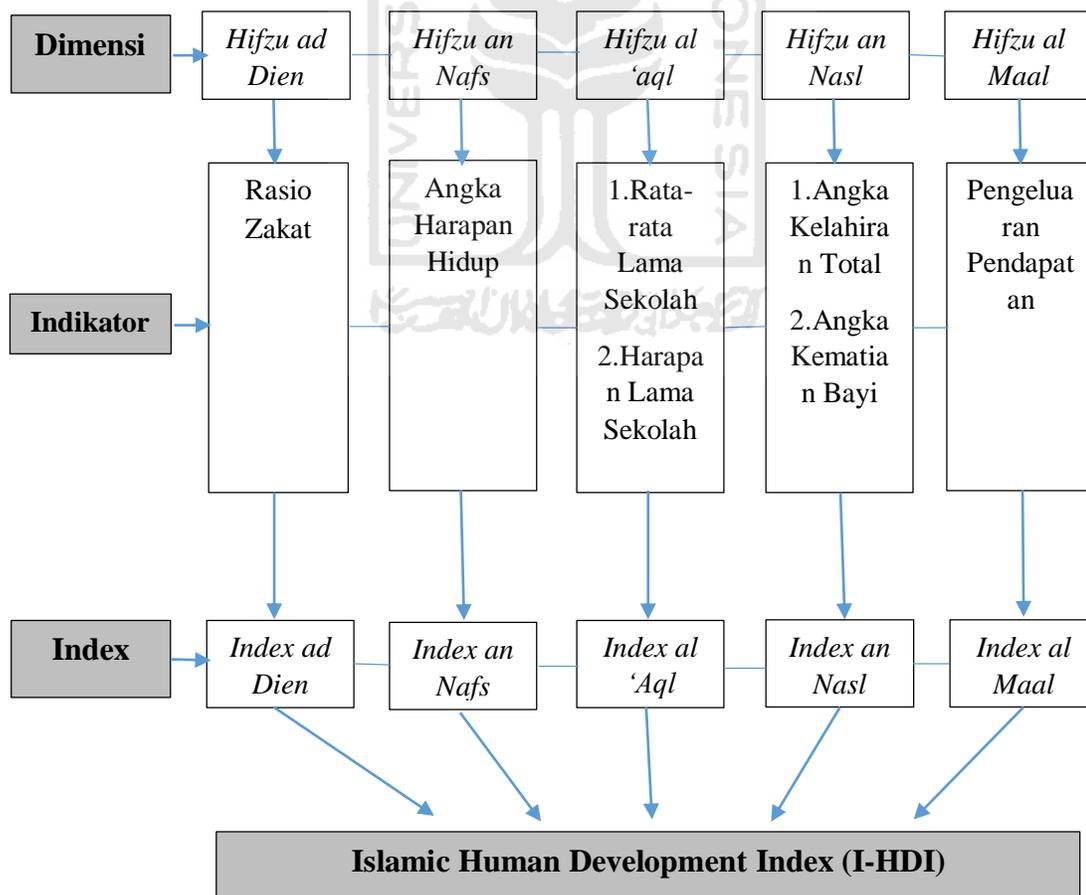
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Instansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik, BAZNAS, Website Resmi Pemerintah, Jurnal, Buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan variabel yang diteliti. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan dari penelitian guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat penelitian dilakukan (Muninjaya, 2003). Adapun yang dijadikan batasan dalam penelitian ini adalah :

1. *Islamic Human Development Index I-HDI*

I-HDI merupakan alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif islam I-HDI digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tingkat kesejahteraan manusia berdasarkan kebutuhan dasar yang terpenuhi, sehingga manusia mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. I-HDI terbagi menjadi lima dimensi yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan serta menjaga harta. Dalam menghitung I-HDI bisa dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3. 1 Penghitungan I-

Tabel 3. 1 Data Indikator Usulan Penghitungan I-HDI

Index	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>Ad Dien</i>	Penerimaan Zakat	1.246.374.504	1.737.416.937	6.182.716.350	10.385.691.470	12.139.280.715
	Pendistribusian Zakat	973.486.679	1.455.552.138	3.257.724.726	10.563.124.114	15.034.860.361
<i>Al Nafs</i>	Angka Harapan Hidup	69.88	69.92	69.95	70.18	70.50
<i>Al 'aql</i>	Rata-rata lama sekolah	7.46	7.62	7.78	7.84	7.98
	Harapan Lama Sekolah	11.60	11.71	11.83	11.87	11.94
<i>An Nasl</i>	Angka Kelahiran Total	2.60%	2.29%	2.46%	2.25%	2.30%
	Angka Kematian Bayi	190	188	159	166	78
<i>Al Maal</i>	Pengeluaran per kapita	1.118.101	1.269.618	1.421.624	1.480.844	1.509.974

Dalam penggunaan masing-masing indikator, pada *index ad dien* penyusun menggunakan rasio zakat yang terdiri dari data penerimaan dan pendistribusian zakat. Penggunaan indikator tersebut dikarenakan adanya hubungan antara agama islam dengan implementasi ajaran islam yang dilakukan oleh masyarakat. Rasio zakat juga dapat digunakan sebagai representasi pengamalan ibadah serta implementasi perbuatan baik sesama manusia dengan cara membantu antara satu dengan lainnya.

Index an Nafs diukur berdasarkan indikator pada Angka Harapan Hidup, penggunaan indikator tersebut dikarenakan cukup mewakili dalam mengukur *index an Nafs*. Selain itu angka harapan hidup juga dapat memproyeksikan rata-rata tahun yang masih bisa dijalani seseorang yang berlaku pada tempat tinggal yang mereka tinggali. Angka Harapan Hidup juga digunakan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator Angka Harapan Hidup sudah sesuai standar nasional maupun internasional.

Indikator pada *index al 'aql* yaitu menggunakan data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penggunaan indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional maupun internasional karena Indeks Pembangunan Manusia yang diusung oleh UNDP juga menggunakan data tersebut, sehingga penggunaan indikator tersebut sangat tepat. Kemudian, rata-rata lama sekolah dapat merepresentasikan bagaimana Sumber Daya Manusia di daerah tersebut dan untuk indikator harapan lama sekolah dapat dijadikan sebagai manifestasi pencapaian suatu daerah serta digunakan untuk bahan evaluasi atau inisiasi kedepannya harus seperti apa.

Indikator pada *index an Nasl* yaitu menggunakan indikator dari data Angka Kematian Bayi dan Angka Kelahiran Total. Secara bahasa *hifdzu an Nasl* adalah menjaga keturunan, maka indikator tersebut sangat tepat jika diaplikasikan pada *index an Nasl*. Penggunaan data Angka Kematian Bayi pada *index an Nasl* dapat dijadikan sebagai evaluasi suatu daerah untuk meminimalisir segala penyebab yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian bayi. Untuk Angka Kelahiran Total juga

dapat dijadikan gambaran suatu daerah untuk dapat mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan ketika angka kelahiran total naik maupun turun.

Indikator pada *index al maal* yaitu menggunakan indikator dari data pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakili dimensi *hifdzu al Maal* karena indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Selain itu, pengeluaran perkapita juga digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator ini sudah sesuai standar layak nasional maupun internasional.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD disusun dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kemampuan pendapatan daerah yang ditentukan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sugianto, 2008). Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti pada APBD, antara lain adalah:

a. Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan rencana suatu aktivitas yang dibuat untuk memuat perkiraan pengeluaran dan perkiraan pemasukan mengenai suatu hal pada masa yang akan datang (Andriana, 2008). Anggaran pendidikan merupakan anggaran perkiraan yang dibuat sebagai upaya yang mencakup seluruh bidang pengetahuan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan anggaran pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu hal yang penting karena dengan besarnya angka pendidikan, maka kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat ditingkatkan.

b. Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan merupakan sebuah rencana upaya yang kebutuhannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan dan mengembangkan kehidupannya dengan baik secara fisik dan mental. Sehingga penggunaan anggaran kesehatan dalam penelitian ini berhubungan dengan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Anggaran Ekonomi

Anggaran ekonomi adalah anggaran dalam menopang semua aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa baik di masyarakat, daerah maupun negara. Sehingga penggunaan anggaran ekonomi dalam penelitian ini berhubungan dengan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3. 2 Indikator Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja
(dalam milyar)

Variabel	Indikator	Jumlah Anggaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
Anggaran Pendidikan	Anggaran Dinas Pendidikan	41.280.320.042,72	62.939.419.6666,57	450.418.981.718	475.321.592.205	534.443.043.501
	Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.700.138.981,50	19.769.562.105,05	38.902.174.302	29.840.395.610,13	34.591.172.386,50

	Anggaran Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	11.399.875.562,40	16.021.641.889,41	16.861.874.563,60	11.661.864.297,41	27.760.414.896,62
	Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi	18.123.648.952,94	16.731.445.875,00	16.108.519.057,00	20.439.928.325	19.040.727.193
	Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.802.361.450,00	24.878.591.403,00	19.201.378.000,00	27.083.526.859	35.963.039.803,95
Anggaran Kesehatan	Anggaran Dinas Kesehatan	144.361.255.710,33	213.139.442.498,67	251.485.945.105,9	277.333.128.020,9	270.490.982.862
	Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	9.680.325.001,00	10.787.327.057,99	13.305.375.458,00	12.960.919.060	15.739.673.014
	Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.555.255.808,00	14.263.210.625,00	15.822.560.173,00	11.976.831.141	12.395.120.433,97
Anggaran Ekonomi	Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15.728.926.000,00	13.542.371.757,00	13.598.238.211,85	27.118.890.846	24.919.696.984,95
	Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.554.900.891,00	23.779.400.582,41	23.464.869.693,41	27.495.293.464	23.361.309.547
	Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	36.343.952.990,00	50.196.141.595,48	43.852.786.916,28	41.979.663.818,5	48.458.109.090,45

Anggaran Inspektorat Daerah	18.837.483.849,00	21.667.860.761,20	20.799.325.855,00	19.460.679.246	20.312.722.493,95
Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.450.313.558,00	27.362.093.477,00	26.544.323.100,60	13.868.255.627	25.764.114.188
Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	8.608.584.842,00	9.698.760.150,00	11.881.464.959,	11.869.642.959	17.878.958.308
Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.099.404.647,00	25.362.906.500,00	24.604.822.410,	19.964.216.440	22.388.900.740

Sumber: APBD tahun 2015-2019

H. Instrumen Penelitian yang digunakan

Instrumen Penelitian dibuat dengan tujuan menghasilkan data yang bersifat akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai ukuran. Dalam arti lain, instrumen digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang akan diteliti (Hermawan, 2019). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti yaitu anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

I. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung I-HDI didapatkan dari indikator, variabel dan dimensi. Pendekatan ini dilakukan bertahap karena menggunakan perhitungan I-HDI yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Diadaptasi dari (Rafsanjani, 2014) I-HDI diukur dengan cara menghitung masing-masing data pada indexnya terlebih dahulu. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung index pada I-HDI adalah sebagai berikut:

$$\text{Index Dimension} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}$$

Keterangan:

Nilai Aktual : Indikator dimensi pada I-HDI

Nilai Maksimal : Nilai maksimal Indikator dimensi pada I-HDI

Nilai Minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi pada I-HDI

Berikut merupakan penjelasan rumus mengenai penghitungan indikator I-HDI, yaitu sebagai berikut.

1. *Index ad-Dien*

Dalam penelitian ini, karena menghitung *index ad-Dien* berdasarkan rasio zakat. Maka yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ID = \frac{\text{Pemanfaatan Zakat}}{\text{Aktual Zakat}}$$

Keterangan:

ID : *Index Dien*

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *ad-Dien*

Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *ad-Dien*

2. *Index an-Nafs*

Index an-Nafs diukur berdasarkan data angka usia harapan hidup, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$INF = \frac{AHH - \text{Minimal AHH}}{\text{Maksimal AHH} - \text{Minimal AHH}}$$

Keterangan:

INF : *Index an-Nafs*

AHH : Angka Harapan Hidup

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *an-Nafs*

Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *an-Nafs*

3. *Index al-'Aql*

Index al-'Aql diukur berdasarkan gabungan data angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Harapan Lama Sekolah} = \frac{HLS - \text{Minimal HLS}}{\text{Maksimal HLS} - \text{Minimal HLS}}$$

$$\text{Rata-rata Lama Sekolah} = \frac{RRLS - \text{Minimal RRLS}}{\text{Maksimal RRLS} - \text{Minimal RRLS}}$$

$$\text{IA} = \frac{1}{3} (\text{Harapan Lama Sekolah}) + \frac{1}{3} (\text{Rata-rata Lama Sekolah})$$

Keterangan:

IA : *Index al-'Aql*

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *al-'aql*

Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *al-'aql*

4. *Index an-Nasl*

Index an-Nasl diukur berdasarkan gabungan data angka kelahiran total dan angka kematian bayi, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kelahiran Total} = \frac{AKT - \text{Minimal AKT}}{\text{Maksimal AKT} - \text{Minimal AKT}}$$

$$\text{Angka Kematian Bayi} = \frac{AKB - \text{Minimal AKB}}{\text{Maksimal AKB} - \text{Minimal AKB}}$$

$$\text{INS} = \frac{1}{2} (\text{Angka Kelahiran Total} + \text{Angka Kematian Bayi})$$

Keterangan:

INS : *Index an-Nasl*

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *an-Nasl*

Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *an-Nasl*

5. *Index al-Mal*

Index an-Nasl diukur berdasarkan data pengeluaran perkapita yang sudah disesuaikan dengan PPP rupiah, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IM} = \frac{\text{Pengeluaran Perkapita} - \text{Minimal PP}}{\text{Maksimal PP} - \text{Minimal PP}}$$

Keterangan:

IM : *Index al-Mal*

Nilai minimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *al-mal*

Nilai maksimal : Nilai minimal dari indikator dimensi *al-mal*

6. Menghitung *Islamic Human Development Index*

Setelah kelima index dari *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dihitung, maka nilai I-HDI dapat dihitung dengan rumus perhitungan aritmatika sebagai berikut:

$$\text{I-HDI} = \frac{2}{6} (\text{ID}) + \frac{1}{6} (\text{INF} + \text{IA} + \text{INS} + \text{IM}) \times 100$$

Keterangan:

I-HDI : *Islamic Human Development Index*

ID : *Index Dien*

INF : *Index an-Nafs*

IA : *Index al-'aql*

INS : *Index an-Nasl*

IM : *Index al-Maal*



BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Secara Kependudukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang ditempati oleh penduduk yang menganut berbagai agama. Berikut merupakan data penduduk berdasarkan agama yang dianut (Kemenag, 2018):

Tabel 4. 1 Data Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten	Agama						Jumlah
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Buddha	Konghucu	
Bangka	270.846	7.458	3.650	29	26.252	7.031	317.052
Belitung	155.257	2.727	1.142	759	9.014	147	169.053
Bangka Selatan	170.721	1.187	723	231	1.496	2.299	176.658
Bangka Tengah	159.581	4.713	4.664	41	6.462	6.814	182.286
Bangka Barat	181.378	2.848	953	27	8.254	3.597	197.066
Belitung Timur	118.554	1.569	405	3	3.380	163	124.079
Pangkalpinang	177.317	8.179	7.164	64	12.860	7.966	213.573
Total	1.233.654	28.708	18.701	1.154	67.718	28.017	1.379.767

Berdasarkan tabel 4. 1, dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan jumlah

1.233.654 orang dari total 1.379.767 penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Kesehatan

Dalam meningkatkan angka kesehatan pada penduduk, pemerintah menyediakan berbagai sarana untuk menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan. Pada dasarnya, pembangunan kesehatan merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Adanya peningkatan pada derajat kesehatan, membuktikan bahwa suatu wilayah mampu memberikan sumbangan nyata untuk meningkatkan daya saing yang dibutuhkan dalam era globalisasi.

Kondisi kesehatan suatu wilayah biasanya diukur melalui salah satu data yaitu Angka Harapan Hidup begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut data Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 2 Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	69.88	69.92	69.95	70.18	70.50

Sumber: (BPS, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 2, disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2016 peluang kehidupan di Provinsi Kepulauan Banga Belitung secara stabil meningkat. Semakin tinggi data tersebut, mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara progresif dapat dikatakan baik.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memajukan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan yang mumpuni bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap wilayah, tak terkecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendidikan merupakan langkah dasar untuk membangun suatu wilayah, karena semakin rendah tingkat pendidikan suatu daerah maka permasalahan yang ditimbulkan meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diperingkat 25 dari 34 provinsi (BPS Indonesia, 2020). Artinya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu dari 10 provinsi yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang mumpuni. Meningkatkan kualitas pendidikan masih menjadi tugas penting bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kondisi Ekonomi

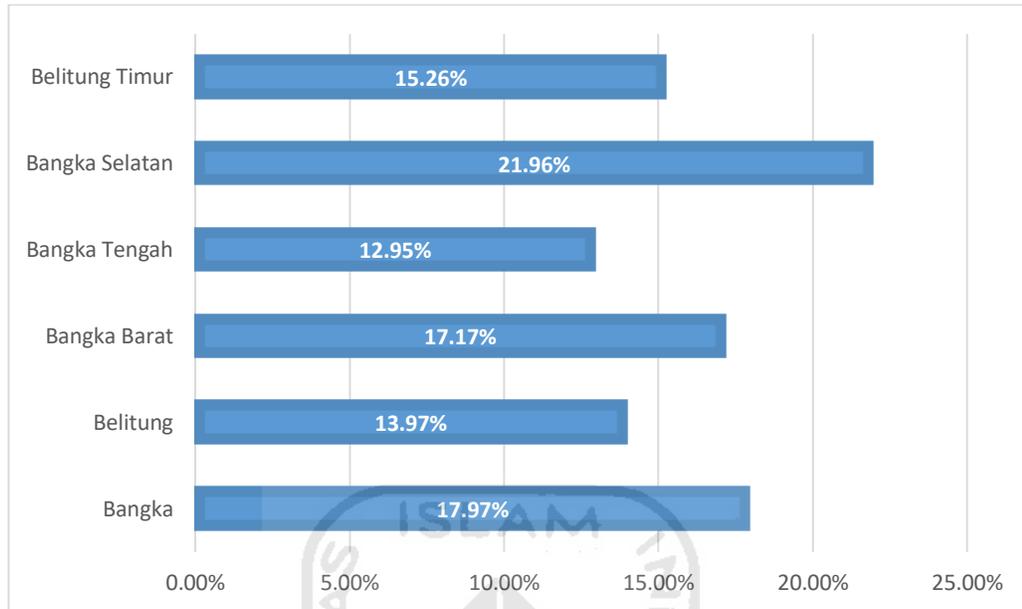
Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang memadai, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat pada tahun 2018. Penyebabnya karena terjadinya penyusutan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,98% (yoy) dan lapangan usaha industry pengolahan sebesar 0,58% (yoy) (Unit Advisory Ekonomi, 2018). Masyarakat sangat bergantung terhadap hasil pertambangan (timah), sehingga ini berdampak terhadap kelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus diminimalisir dengan upaya peningkatan peran dan potensi ekonomi, yang dapat dilakukan dengan penekanan terhadap urgensi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan. Ini menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia dalam suatu daerah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

b. Secara Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pada sejarahnya, wilayah Bangka Belitung pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah melewati masa kerajaan, Bangka Belitung pun merasakan jajahan dari Negara Inggris dan Negara Belanda dengan melakukan beberapa perlawanan yang membuat Bangka Belitung mampu bertahan hingga saat ini (Profil Provinsi Bangka Belitung, 2019). Pada tahun 2000 Bangka Belitung resmi menjadi wilayah provinsi ke-31 dan tidak menginduk bersama Sumatera Selatan lagi. Hal ini dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki total luas wilayah daratan dan wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 81.752,06 kilometer persegi. Luas daerah daratan sebesar 16.424,06 kilometer persegi dan luas lautan sebesar 65.301 kilometer persegi. Secara administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 kabupaten dan 1 Kota yaitu Pangkalpinang. Kabupaten terbesar di duduki oleh Bangka Selatan dengan wilayah sebesar 21,96% dari total 100% wilayah tersebut., dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Selat Bangka
Sebelah Timur	: Selat Karimata
Sebelah Utara	: Laut Natuna
Sebelah Selatan	: Laut Jawa



Sumber: (Aspek Geografis, 2020)

Gambar 4.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain itu, wilayah provinsi ini terletak pada $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis. Ketika musim hujan tiba, beberapa daerah tergenang oleh air. Ketika kemarau, tidak sedikit sumur warga kehabisan air karena kering. Selain itu, kelembapan udara di wilayah provinsi ini masih tergolong baik untuk kesehatan dan pertanian.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni. Beberapa yang menjadi potensi daerah antara lain pada sektor pertambangan salah satunya adalah timah. Timah merupakan produk andalan yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sektor pertambangan. Meskipun tidak diunggulkan dalam pengembangannya, hasil dari pertambangan ini masih menjadi andalan ekonomi masyarakat Bangka Selatan dengan kontribusi 24,37%. Disamping timah, beberapa komoditas lain pada sektor

pertambangan adalah granit, pasir kuarsa, kaolin, bijih besi, zircon, monasit, tanah liat dan tanah urug (BAKUDA, 2020).

Potensi lain yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada sektor pertanian dan perkebunan.. Sub sektor perkebunan memberi kontribusi terhadap PDRB mencapai 19,01%. Komoditas unggulan yang dihasilkan adalah lada, karet, kelapa sawit dan kelapa. Jenis lada yang dihasilkan didaerah Bangka Selatan merupakan jenis lada putih yang terkenal di negara-negara Eropa. Lada ini juga merupakan jenis komoditas unggulan yang kualitasnya cukup baik. Selain lada, karet dan kelapa sawit juga merupakan komoditas andalan. Pada tahun 2011, produksi karet diperkirakan mencapai 8.817 ton.

Pada sektor kehutanan, kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 seluas 659.104 Ha. Hutan yang terdapat di wilayah ini dikategorikan menjadi empat yaitu, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi konservasi. Berikut tabel kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babelprov, 2020):

Tabel 4. 1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Hutan	Luas Hutan
Hutan Konservasi	35.472 Ha
Hutan Lindung	189.965 Ha
Hutan Produksi	432.884 Ha
Hutan Produksi Konservasi	693 Ha

Sumber: (KESBANGPOL, 2020)

Dengan wilayah kepulauan, tentu saja potensi lain dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya adalah sektor kelautan dan perikanan. Dalam pengelolaannya wilayah ini berfokus pada pengembangan perikanan laut, payau maupun tawar. Jumlah produksi pada tahun 2012 mencapai 202.565 ton. Selain itu, kondisi pantai yang mengelilingi Pulau Bangka dan Belitung berjenis pantai yang

diselingi oleh batu granit membuat pemandangan semakin elok dipandang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pada sektor lain yaitu pariwisata. Tercatat, pada bulan Oktober 2019 jumlah tamu yang menginap berjumlah 44.603 orang. Jumlah ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 36.098 tamu yang menginap pada hotel berbintang (BPS Babel, 2020).

B. Pencapaian Islamic Human Development Index di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pencapaian I-HDI dihitung melalui indikator yang diambil dari data angka Pendistribusian dan Penghimpunan Zakat, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi dan data pengeluaran per kapita. Pada sub bab ini akan dijelaskan runtutan penghitungan I-HDI mulai dari *index ad Dien*, *index an Nafs*, *index al 'aql*, *index an Nasl*, *index al Maal* dan I-HDI dengan menggunakan data-data indikator yang telah ditemukan sehingga hasil pencapaian I-HDI yang ditemukan nanti bisa menjadi gambaran bagaimana pemanfaatan anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari setiap indikator komponen I-HDI yang dihitung berdasarkan data di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah dikumpulkan.

1. *Hifzu ad Dien*

Hifzu ad Dien atau yang berarti menjaga agama merupakan cara untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Menjaga agama juga bisa dikatakan mengamalkan serta menghormati peraturan-peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan-Nya. Menjaga agama didapatkan dengan cara melaksanakan berbagai macam ibadah seperti, sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, zakat dan lainnya. Dalam pembangunan manusia, dimensi *Hifzu ad Dien* dapat dihitung berdasarkan indikator yang masih berhubungan dengan agama islam. Menurut Rama dan Yusuf, *hifzu ad Dien* bisa dihitung menggunakan indikator rasio zakat (Rama, 2019). Karena, idealnya penelitian harus

memiliki indikator yang mana dapat mengukur visi, komitmen serta implementasi ajaran Islam dalam masyarakat. Rasio zakat dapat dijadikan sebagai representasi dari pengamalan ibadah. Berikut, data jumlah penghimpunan dan pendistribusian zakat dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 2 Jumlah Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2015-2019

Data	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penghimpunan	1.246.371. 504	1.737.416. 937	6.182.716. 350	10.385.691. 470	12.139.280. 715
Pendistribusian	973.486.67 9	1.455.552. 138	3.257.724. 726	10.385.691. 470	15.034.860.. 361

Sumber : (baznasbabel., 2019)

Berdasarkan tabel 4.2. 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan antara dana penyaluran zakat dan pendistribusian zakat. Hal tersebut baik, karena semakin tingginya dana penghimpunan zakat maka dapat dimanfaatkan untuk pembangunan manusia maupun daerah. Sedangkan untuk dana pendistribusian zakat, semakin tinggi dana zakat yang disalurkan maka semakin baik untuk pengoptimalan dana zakat bagi masyarakat. Dari hasil dana penghimpunan maupun pendistribusian zakat dapat dihitung untuk mengukur *index ad Dien*. Berikut hasil dari *index ad Dien* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 3 Hasil Penghitungan *Index ad Dien* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2017

2015	2016	2017	2018	2019
0.78	0.83	0.52	1.01	1.23

Sumber: Lampiran 4, diolah

Pada penghitungan *index ad Dien*, dapat diketahui bahwa hasil dari *index ad Dien* selama 5 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 ke 2016 hasil penghitungan I-HDI naik sebesar 0.05, hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan zakat tetapi dalam pemanfaatannya masih belum secara penuh dimanfaatkan. Untuk tahun 2017 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh hampir setengah dari total penghimpunan zakat tidak digunakan secara optimal. Dari ketiga tahun ini, hasil rasio zakat belum memenuhi kualifikasi karena belum mencapai angka 1, dimana angka tersebut merupakan batasan dari rasio zakat. Tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah yang sudah melewati angka 1. Pada tahun ini, untuk pendistribusian zakatnya lebih banyak dari penghimpunan zakat yang berarti dana tersebut dioptimalkan pada dua tahun terakhir. Adanya defisit dana pada penyalurannya tidak terlalu berpengaruh karena bisa ditopang oleh dana sumbangan lainnya seperti *infaq*, *shadaqah* dan lainnya. Zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam dalam menjalankannya, urgensi zakat pun dituang pada rukun islam serta ayat-ayat Al-Qur'an yang tertulis pada surat An-Nisa ayat 162:

لٰكِنَ الرَّسٰخُوْنَ فِي الْاٰلَمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةِ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ ۱۶۲

Artinya: "Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar."

Berdasarkan surat diatas, dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban semua umat muslim. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti melakukan shalat, menunaikan zakat serta semua yang diperintahkan oleh Allah SWT maka akan mendapat balasan baik yang setimpal atas apa yang sudah dilakukan.

2. *Hifzu an Nafs*

Hifzu an Nafs atau menjaga jiwa merupakan dimensi penting lainnya setelah menjaga agama. Hal ini dikarenakan setiap yang berjiwa pasti melaksanakan ketentuan agama atau ketentuan lainnya yang sudah ditetapkan. Salah satu syarat wajib menjalankan suatu ibadah yaitu, dilaksanakan oleh mereka yang sehat rohani maupun jasmaninya (berakal). Pada dimensi *hifzu an Nafs* dapat dihitung melalui indikator data angka harapan hidup. Indikator pada dimensi *hifzu an Nafs* sudah cukup untuk mewakili dalam mengukur dimensi *hifzu an Nafs*. Karena indikator yang digunakan pada penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mewakili bidang kesehatan juga menggunakan indikator tersebut. Selain itu, angka harapan hidup juga memproyeksikan rata-rata tahun yang masih bisa dijalani seseorang yang berlaku pada tempat tinggal yang mereka tinggali. Penggunaan indikator angka harapan hidup tentunya sudah sesuai standar nasional maupun internasional. Berikut data angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 3 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Data	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	69.88	69.92	69.95	70.18	70.50

Sumber: (BPS Babel, Indeks Pembangunan Manusia, 2020)

Berdasarkan tabel 4.2. 3, tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat peningkatan. Artinya, masyarakat dan pemerintah sama-sama mengupayakan tingkat kesehatan yang lebih baik. Setelah diperoleh data angka harapan hidup, kemudian dicari berapa angka maksimal dan minimal untuk melengkapi rumus yang telah dibuat sehingga dapat menghasilkan suatu nilai *index*. Berikut merupakan hasil dari penghitungan *index an Nafs* selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 4 Hasil penghitungan *index an Nafs* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
0.767	0.768	0.7684	0.772	0.776

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Dari penghitungan tabel 4. 4 angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 hingga 2019 meningkat, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 *index an Nafs* yang dihasilkan hanya meningkat 0,0004 saja. Jika dilihat dari data angka harapan hidup pada tahun 2016 dan 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 69.92 dan 69.95 maka pada tahun tersebut hanya mengalami peningkatan kecil sehingga berdampak pada hasil *index an Nafs* yang sedikit berubah. Sedangkan pada tahun lainnya berangsur-angsur meningkat. Dalam hal ini, *index an Nafs* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir terus mengupayakan perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan.

Hak untuk hidup merupakan hak fundamental untuk setiap manusia, semakin tinggi angka harapan hidup semakin tinggi juga umur yang lebih panjang yang mana artinya menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, *index an Nafs* merupakan bentuk perlindungan diri yang didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan pangan, juga perlindungan kesehatan. Menjaga kesehatanpun telah dianjurkan oleh ayat Al-Qur'an yang tertuang pada surah Al An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas menyatakan perintah untuk tidak memakan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah SWT karena semua itu dapat berdampak buruk kepada manusia apabila mengonsumsinya. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan agar senantiasa menjaga pola makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga, apa yang masuk kedalam diri kita diridhoi oleh Allah SWT dan dipastikan kebaikan yang akan kita terima.

Menurut analisis peneliti, bentuk dari pemenuhan *hifzu an Nafs* adalah berusaha untuk menjaga kesehatan. Maka penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa melakukannya karna terbukti dari penghitungan *index an Nafs* yang setiap tahunnya menunjukkan hasil peningkatan walaupun dua tahun mengalami sedikit peningkatan. Pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan menjadi wajib karena hal ini termasuk kebutuhan primer, yang mana jika tidak terpenuhi maka akan berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Dalam hal ini, tingkatan pada memelihara jiwa termasuk kedalam peringkat yang bersifat *daruriyah*.

3. *Hifzu al ‘aql*

Hifzu al ‘aql atau menjaga akal merupakan dimensi lainnya yang terdapat di konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Meningkatkan ilmu pengetahuan merupakan hal mendasar bagi pembangunan manusia dan salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk menghitung *index al ‘aql* diperlukan indikator yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari *index* itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti menggunakan indikator berupa data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 5 Data Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

No.	Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama sekolah	7.46	7.62	7.78	7.84	7.98
2.	Harapan lama sekolah	11.60	11.71	11.83	11.87	11.94

Sumber: BPS, Babel

Berdasarkan tabel 4. 5, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah setiap tahunnya. Hal ini cukup baik, mengingat semakin meningkat angka yang dihasilkan maka terdapat perbaikan kualitas pendidikan dari tahun ketahun. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, untuk rata-rata lama sekolah kurang lebih hanya sampai tamatan Sekolah Dasar. Sedangkan dari data harapan lama sekolah pendidikan hampir mencapai Sekolah Menengah Atas. Berikut merupakan hasil dari penghitungan *index al 'aql* selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4. 6 Hasil Penghitungan *Index al 'aql* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
0.503	0.531	0.538	0.540	0.545

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4. 6, *index al 'aql* dari tahun 2015 ke 2016 naik sebesar 0,028. Sedangkan tahun berikutnya dari tahun 2016 ke 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0.007. Untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu 0,002, pada tahun ini hanya sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang

terakhir tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan yang sedikit yaitu sebesar 0.005. Meningkatnya angka *index al 'aql* setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun begitu, hasil penghitungan *index al 'aql* masih tergolong belum mumpuni untuk bidang pendidikan karena data yang dihasilkan dari rata-rata lama sekolah belum cukup untuk bisa dikatakan baik dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Urgensi dalam menjaga akal dalam konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sama halnya dengan menjaga dimensi lainnya. Karena tanpa akal, manusia tidak bisa memahami seluruh ajaran Allah SWT, alam semesta dan ilmu lainnya. Sehingga hal ini sangat penting untuk terus melakukan pembaruan terhadap ilmu, seperti belajar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu yang tertuang pada surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa menuntut ilmu adalah aktivitas yang disukai oleh Allah SWT. Menuntut ilmu dapat menjadi pembeda antara keberadaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal, manusia diberi kemampuan lebih untuk berpikir dan mempelajari semua hal yang terdapat di alam semesta. Berdasarkan dengan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI), menjaga akal berkaitan dengan pendidikan formal yang harus ditempuh semua makhluk hidup dalam suatu wilayah maupun negara. Pendidikan juga merupakan hak bagi warga negara yang tertuang pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, pendidikan

sangat penting dan merupakan kebutuhan *hajiyyah* yang artinya anjuran menuntut ilmu pengetahuan itu wajib dan akses untuk menuntut ilmu dapat diperoleh dari manapun.

4. *Hifzu an Nasl*

Hifzu an Nasl atau menjaga agama adalah dimensi dari *Islamic Human Development Index (I-HDI)* yang keempat. *Hifzu an Nasl* merupakan upaya pelestarian keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Dalam hal ini, manusia harus menjaga, memelihara serta melindungi generasi mereka untuk mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga untuk menghitung index *an Nasl* dibutuhkan suatu indikator yang sesuai dengan gambaran dimensi *hifzu an Nasl*. Adapun indikator yang digunakan adalah data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

Tabel 4. 7 Data Angka Kelahiran Total Dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

No.	Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelahiran Total	2.60%	2.29%	2.46%	2.25%	2.30%
2.	Angka Kematian Bayi	190	188	159	166	78

Sumber: (BPS Babel, Indeks Pembangunan Manusia, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 7 angka kelahiran total penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir cenderung tidak stabil, bisa dilihat untuk tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0.31. Kemudian untuk tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 0.17, untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0.21 dan untuk tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.05 saja. Untuk angka kematian bayi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015 hingga 2019 juga tidak stabil,

angka paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2015 sebesar 190 kematian bayi per 1000 kelahiran. Angka tersebut sangat tinggi untuk suatu wilayah provinsi. Tetapi, untuk tahun 2019 terjadi penurunan drastic. Artinya, pemerintah dapat menekan angka kematian bayi.

Tabel 4. 8 Hasil penghitungan *index an Nasl* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
2.325	2.05	1.965	1.845	1.185

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4. 8, *index al Nasl* dari tahun 2015 ke 2016 turun sebesar 0,275. Sedangkan tahun berikutnya dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar 0.085. Untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 0.12, yang terakhir tahun 2018 ke 2019 terdapat penurunan sebesar 0.66. Artinya, dalam lima tahun terakhir *index an Nasl* mengalami penurunan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana untuk menekan angka kelahiran total dan angka kematian bayi, begitupun dengan masyarakat yang sudah memiliki rasa kepedulian untuk mengaplikasikan program-program yang telah pemerintah canangkan. Dalam hal ini, memang harus terdapat kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan angka kematian bayi.

Dalam pengendalian laju penduduk, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ambisi untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Program ini dicanangkan agar pertumbuhan laju penduduk tumbuh dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan lajunya angka penduduk yaitu dengan Program Keluarga Berencana KB, menekan pernikahan usia dini dan lainnya. Target pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk angka kelahiran total sebesar 2.1% per tahun (Babelprov, 2020).

Pada tabel 4. 8 hasil dari angka kematian bayi, diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan terdapat upaya besar untuk menekan angka kematian bayi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implementasi dari aspirasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Harapannya, kualitas hidup penduduk pun meningkat seiring dengan meningkatnya angka kualitas harapan hidup. Angka kematian bayi merupakan salah satu dari indikator untuk menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena sudah mewakili kesehatan penduduk secara general.

Dalam konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI), memelihara keturunan tidak hanya sekedar memproduksi anak saja melainkan juga harus merawatnya, menjaga kesehatannya agar tumbuh sebagai generasi yang baik. Hal ini sudah tertuang di surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾

Artinya: " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. "

Pada Ayat tersebut dianjurkan untuk merawat, mengasahi anak dengan baik serta perintah untuk seorang ayah dalam menafkahi istrinya (yang mana juga kepada anaknya). Selain pada konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)* *hifzu an Nasl* juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. *Hifzu an Nasl* merupakan suatu hal yang bersifat *daruriyyah*, sehingga harus dicukupi kebutuhannya. Apabila tidak tercukupi maka akan mempengaruhi dimensi lainnya, atau dengan kata lain *hifzu an Nasl* merupakan salah satu dimensi penting pada konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)*.

5. *Hifzu al Maal*

Hifzu al Maal merupakan dimensi terakhir dari konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)*. Pada penempatannya yang terakhir, bukan berarti dimensi *hifzu al Maal* tidak memiliki peran penting. Namun, dimensi ini menempati kedudukan paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia atau dalam konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)* sendiri. Dimensi ini bersifat *daruriyyah* yang artinya harus dicukupi kebutuhannya. Apabila tidak tercukupi maka akan menyebabkan hilangnya keberlangsungan hidup seseorang atau memberi dampak yang buruk untuk kehidupan seseorang yang tidak mencukupi dimensi *hifzu al Maal*. Untuk menghitung dimensi ini maka dibutuhkan indikator yang dapat mewakili penghitungan dari *index al Maal*, yaitu menggunakan data pengeluaran per kapita selama sebulan dari tahun 2015 hingga 2019. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakilkan dimensi *hifzu al Maal* karena indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Pengeluaran perkapita juga digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Berikut data dari pengeluaran perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 4. 9 Data Pengeluaran Perkapita Selama Sebulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
1.118.101	1.269.618	1.421.624	1.480.844	1.509.974

Sumber: (BPS Babel, 2020)

Berdasarkan tabel 4. 9 mengenai pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir menggambarkan bahwa pengeluaran terkecil terjadi pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2019. Hal ini sangat wajar, karena pada 5 tahun terakhir pengeluaran perkapita selalu meningkat dari tahun ke tahun. Batas maksimal yang ditentukan oleh BPS adalah sebesar Rp. 732.720 sedangkan batas minimalnya sebesar Rp. 360.000. Mengenai batasan yang telah ditentukan BPS, dari data diatas terbukti bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah jauh berada diatas rata-rata maksimal yang telah ditentukan, untuk tahun 2018 dan 2019 kenaikan dari batas maksimal mencapai dua kali lipatnya. Semakin tinggi pendapat yang diperoleh maka akan berdampak pada seberapa besar pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 4. 10 Penghitungan I-HDI *Index al Maal* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
1.99	2.44	2.84	3.00	3.08

Sumber: Lampiran 4 (diolah)

Berdasarkan tabel 4. 10 mengenai *index al Maal* pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan sebesar 0.45, sedangkan dari tahun 2016 ke 2017 terjadi peningkatan sebesar 0.4, untuk tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.16 dan pada tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan sebesar 0.08. Pada hasil penghitungan *index al Maal* terlihat adanya peningkatan setiap tahun yang berarti penduduk Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sudah mencukupi standar kualitas hidup yang layak. Kemampuan penduduk dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang baik, maka hal tersebut merupakan bentuk terlaksananya penjagaan pada harta. Hal ini tertuang pada ayat Al-Qur'an Al Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: "Dan ketahilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memperingatkan hamba-Nya agar senantiasa mengetahui bahwa harta dan anak mereka merupakan ujian. Ujian disini digambarkan sebagai perbandingan, apakah dengan harta dan anak manusia makin lalai menjalankan ketentuan Allah SWT atau dengan harta dan anak manusia semakin meningkatkan ketaqwaanya kepada Allah SWT. Tentu saja ayat ini sebagai peringatan kepada manusia untuk menjaga harta dan memperoleh nya dengan cara yang baik.

Menjaga harta termasuk dalam aspek *daruriyyah* yang berarti masuk dalam kategori kebutuhan primer. Dari semua dimensi pokok yang terdapat pada konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keurunan dan harta semuanya saling berhubungan. Karena harta menjadi suatu hal dasar bagi kehidupan seseorang, maka eksistensi nya sangat berkaitan erat dengan dimensi lainnya. Ketika ada seseorang yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan itu disebabkan karena tidak tercukupinya pemenuhan hal *daruriyyah* dalam hal ini yaitu menjaga harta.

6. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Index yang ada dalam konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sudah dihitung berdasarkan indikator yang ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019, maka memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Pencapaian *Index* pada *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Index	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>ad Dien</i>	0.78	0.83	0.52	1.01	1.23
<i>an Nafs</i>	0.767	0.768	0.7684	0.772	0.776
<i>al 'aql</i>	0.503	0.531	0.538	0.540	0.545
<i>an Nasl</i>	2.325	2.05	1.965	1.845	1.185
<i>al Maal</i>	1.99	2.44	2.84	3.00	3.08

Sumber: Lampiran 4 diolah

Dari hasil penghitungan index pada tabel 4. 11 yang sudah ada, maka dapat diperoleh hasil penghitungan I-HDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Pencapaian I-HDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
119	124.15	119.18	136.28	154

Sumber: Lampiran 4 diolah

Dari hasil tabel 4. 12, berdasarkan pengelompokan capaian untuk Index Pembangunan Manusia yang mana dalam hal ini konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) juga mengikuti pengelompokan capaian tersebut. Selama lima tahun terakhir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diatas ≥ 80 , artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tingkat pencapaian I-HDI yang tinggi.

Walaupun terlihat adanya peningkatan dan penurunan, tetapi data I-HDI yang dihasilkan tetap berada dikategori yang tinggi.

Pada tahun 2015 I-HDI yang dicapai sebesar 119 yang berarti tingkat pencapaian I-HDI sangat tinggi karena angka tersebut berada 39 angka diatas standar pencapaian yang ditentukan yaitu 80. Tingginya angka tersebut disumbang oleh *index an Nasl* sebesar 2.325 kemudian disusul oleh *al Maal* sebesar 1.99, *ad Dien* sebesar 0.78, *an Nafs* sebesar 0.767 dan *al 'aql* sebesar 0.503. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan jika pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa menekan angka dari *index an Nasl*, dilihat dari indikator angka kematian bayi pada tahun 2015 paling tinggi diantara tahun lainnya yaitu sebesar 190 kematian bayi. Sedangkan untuk indikator angka kelahiran total pada tahun 2015 sebesar 2.60% yang juga lebih tinggi dari tahun lainnya. Untuk *index al Maal* sendiri sebesar 1.99 lebih kecil diantara lainnya, namun hal ini masih cukup dalam pemenuhan kebutuhan, karena standar pengeluaran perkapita di Indonesia minimal sebesar Rp. 360.000 sedangkan pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.118.101. *Index ad Dien* dalam hal ini menyumbang angka sebesar 0.78 dari data yang diperoleh antara dana penghimpunan dan dana pendistribusian digunakan secara seimbang pada tahun 2015. Berikutnya adalah *index an Nafs* sebesar 0.767 lebih kecil diantara tahun lainnya sama seperti *index al 'aql* yang menyumbang nilai sebesar 0.503. Artinya, masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya mengupayakan implementasi dari *index an Nafs* dan *al 'aql*.

Pada tahun 2016 I-HDI yang dihasilkan sebesar 124,15 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingginya angka tersebut disumbangkan oleh *index al Maal* sebesar 2.44, disusul oleh *index an Nasl* sebesar 2.05, kemudian *index ad Dien* sebesar 0.83, *an Nafs* sebesar 0.768 dan *al aql* sebesar 0.531. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikategorikan sangat baik karena tingginya sumbangan dari *index al Maal* sebesar 2.44, artinya penduduk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah bisa mengupayakan

kebutuhannya dengan baik. Untuk index *an Nasl* menyumbang sebesar 2.05 yang berarti terdapat penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.27. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya angka kelahiran total dan angka kematian pada bayi. Index *ad Dien* pada tahun 2016 ini memiliki nilai sebesar 0.83 yang artinya dana pendistribusian zakat telah digunakan secara seimbang. Kemudian pada index *an Nafs* mencapai 0.768, lebih tinggi 0.001 dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat sedikit peningkatan, ini sudah membuktikan bahwa pemerintah juga mengupayakan implementasi dari index *an Nafs* itu sendiri. Index selanjutnya adalah *al 'aql* yang menyumbang nilai sebesar 0.531, dari semua index *Islamic Human Development Index (I-HDI)* pada tahun 2016 *index al 'aql* menempati kedudukan *index* yang terakhir karna rendahnya angka yang diperoleh. Rendahnya angka tersebut mengindikasikan minimnya upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, sehingga hasil *index al 'aql* selalu menduduki peringkat terakhir.

Pada tahun 2017, I-HDI yang dihasilkan sebesar 119.18. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan *index ad Dien* dan *index an Nasl*. Berdasarkan tabel hasil penghitungan *index*, *index al Maal* menyumbang nilai sebesar 2.84, *index an Nasl* 1.96, *index an Nafs* 0.7684, *index al 'aql* 0.538 dan yang terakhir *index ad dien* 0.52. Untuk *index al Maal* pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.4 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk *index an Nasl* yaitu sebesar 1.965 menurun 0.09 dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai *index an Nasl* mengindikasikan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kelahiran total dan angka kematian bayi, hal ini cukup baik mengingat standar pencapaian untuk angka kelahiran total harus berada pada angka 2.1%. Selanjutnya adalah *index an Nafs* sebesar 0.7684, jika dilihat dari *index* tahun sebelumnya tidak ada peningkatan yang signifikan atau bisa dikatakan tetap. Untuk *index al 'aql* mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.007 yang berarti terdapat upaya antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pada tahun ini, *index* yang menduduki posisi terakhir adalah *index ad dien* dengan angka sebesar 0.52. *index ad dien* mengalami penurunan sebesar 0.31 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya pemanfaatan dana zakat, terbukti dari data yang hamper setengah dari dana pendistribusian yang tidak dilakukan pemanfaatan. Maka dari itu, *index ad dien* mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan angka terendah dari lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018, I-HDI yang dihasilkan sebesar 136.28. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 17.1 dari tahun sebelumnya, kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan terhadap *index ad Dien* dan *index al Maal*. *Index ad Dien* pada tahun ini menyumbang angka sebesar 1.01, meningkat sebesar 0.49 dari tahun sebelumnya. Artinya, antara dana penghimpunan dan dana pendistribusian sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah. *Index an Nasl* menggambarkan adanya keberhasilan upaya pemerintah dalam menekan angka kelahiran total dan kematian bayi. Sebagai penyumbang nilai tertinggi pada penghitungan I-HDI tahun 2018, *index al Maal* berhasil menyumbang nilai sebesar 3.00 atau pengeluaran perkapita selama sebulan sebesar Rp. 1.480.844. Pengeluaran tersebut sangat besar apabila dibandingkan dengan batasan maksimal yang ditentukan BPS sebesar Rp.732.720. Artinya, secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah masuk dalam kategori yang baik. Untuk *index an Nafs* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.0036 sama halnya dengan *index al 'aql* yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.002.

Pada tahun 2019 nilai I-HDI mengalami penurunan signifikan sebesar 9.83 dari tahun sebelumnya. Nilai I-HDI pada tahun ini juga merupakan nilai I-HDI terkecil dari lima tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan oleh turunnya *index an Nasl* serta sedikitnya peningkatan di *index-index* lainnya. Pada *index an Nasl* 2019 terjadi penurunan sebesar 0.68 dari tahun sebelumnya, bahkan lima tahun terakhir ini adalah *index an Nasl* terkecil. Sebenarnya hal itu baik, dalam arti masyarakat sudah mau menjalankan program-program yang pemerintah jalankan untuk

menekan tingginya angka kelahiran total beserta angka kematian bayi. Penyumbang terbesar pada nilai I-HDI tahun 2019 adalah *index al Maal* sebesar 3.08 walaupun peningkatannya tidak terlihat signifikan, tetapi hal tersebut masih memengaruhi nilai I-HDI. Selanjutnya adalah nilai *index ad Dien* pada tahun 2019 ini memiliki nilai sebesar 1.23 yang mana angka tersebut menduduki angka tertinggi selama setahun terakhir. Pada *index an Nafs* dan *al 'aql* terjadi peningkatan sebesar 0.005 dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan nilai *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik selama tahun 2015-2019. Walaupun ada peningkatan dan penurunan tetapi tidak mempengaruhi nilai I-HDI yang sudah melampaui kategori ≥ 80 . Sehingga, bagi suatu wilayah yang memiliki nilai pencapaian I-HDI yang sudah masuk angka 80 bahkan melampauinya dapat diartikan bahwa wilayah tersebut sudah mampu memenuhi konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) walaupun masih harus dilakukan upaya perbaikan kedepannya.

C. Anggaran Bidang Kesehatan Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Kesehatan merupakan salah satu hal dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang keberadaannya harus terpenuhi. Urgensi dari kesehatan sendiri tidak hanya dilakukan oleh suatu individu saja, namun negara pun juga harus memenuhi kebutuhan tersebut sebagai pencapaian kesejahteraan penduduknya. Maka dari itu, pemerintah menyadari akan urgensi kesehatan sehingga jaminan kesehatan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, implementasi dari pemenuhan kesehatan bagi negara adalah dirumuskannya anggaran pada bidang kesehatan. Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi program-program pemerintah yang berkaitan dengan bidang kesehatan melalui perspektif I-HDI. Berikut anggaran kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019:

Tabel 4. 13 Jumlah Anggaran Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam milyar)

2015	2016	2017	2018	2019
166.596.806.5	238.189.980.1	280.604.880.7	302.270.878.2	298.625.776.3
79,33	81,66	36,9	21,9	09,97

Berdasarkan tabel 4. 13 disimpulkan bahwa jumlah anggaran kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 fluktuatif. Jumlah anggaran kesehatan tertinggi diduduki oleh tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 302.270.878.221,9. Anggaran tersebut diambil berdasarkan kegiatan atau bidang yang berhubungan dengan kegiatan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun. Anggaran kesehatan yang diambil pun berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI), anggaran kesehatan mencakup 5 dimensi yang ada pada konsep I-HDI itu sendiri. Eksistensi dari anggaran kesehatan harus digunakan dan dirancang dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kesehatan bersifat *daruriyyah* begitupun dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan menurut dimensi *ad Dien* dapat diimplementasikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang menunjang terlaksananya *ad Dien*. Ketika manusia dalam kondisi yang sehat secara aspek jiwa dan fisiknya maka dapat melaksanakan hal-hal yang bersangkutan dengan agama dapat lebih baik. Adapun hubungan anggaran kesehatan dengan aspek agama ini memungkinkan pelaksanaan aktivitas kesehatan dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Misalnya, terdapat program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah seperti promosi kesehatan cegah seks bebas. Program ini tentunya

sangat berhubungan dengan anggaran kesehatan serta keagamaan. Karena program ini menginformasikan bagaimana dampak buruk yang diterima apabila melakukan seks bebas kepada masyarakat khususnya remaja, kemudian jika dilihat dari sisi agama seks bebas dilarang karena itu adalah perbuatan zina sebagaimana telah diatur dalam surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلِّلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَوَّوْا ۗ لِّلَّهِ مِّن فَضْلِهٖ إِن ۖنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan ayat diatas, telah ditentukan bahwa zina merupakan hal yang keji dan jalan yang buruk sekecil apapun. Dampak buruk dari zina bagi kesehatan sangat beresiko tinggi karena berpotensi untuk terkena infeksi menular seksual (IMS). Sehingga, anggaran kesehatan dalam pemanfaatannya sangat berpengaruh terhadap segala aspek termasuk aspek keagamaan.

Selain berhubungan dengan aspek keagamaan, ternyata anggaran kesehatan juga berkaitan dengan aspek kejiwaan atau *an Nafs*. Saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, karena hal tersebut sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup seseorang. Apabila jiwa kita sehat maka kita dapat bertindak dan beraktivitas baik dibawah pengaruh kita sendiri. Selain itu, jika dilihat menggunakan konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)* indikator dari *an Nafs* itu sendiri sangat berhubungan dengan kesehatan karena diukur berdasarkan data angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga antara *an Nafs* dan kesehatan sangat berkaitan, sama halnya juga dengan anggaran kesehatan. Contoh dari pemanfaatan anggaran kesehatan pada aspek *an Nafs* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) (kemenpppa, 2020). Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak partisipasi seluruh pihak untuk

mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak. Hal ini mengimplementasikan peran anggaran kesehatan terhadap *index an Nafs* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memiliki akal adalah suatu pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, dalam konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terdapat dimensi yang berhubungan dengan akal yaitu *hifzu al 'aql* dengan *index al 'aql*. Dalam *index al 'aql*, selalu disangkut pautkan dengan pendidikan. Pemenuhan *index al 'aql* merupakan kebutuhan dasar yang bersifat *daruriyyah*. Karena jika terpenuhi *al 'aql* pada setiap orang maka akan memudahkan keberlangsungan hidup lainnya. Anggaran kesehatan menurut *al 'aql* dapat diimplementasikan melalui program kesehatan yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu peran dari anggaran kesehatan di Bangka Belitung adalah adanya kampanye 4 Sehat 5 Sempurna yang terbilang sukses dan selalu diterapkan di setiap Sekolah Dasar. Selain itu terdapat program yang melakukan penjangkauan kesehatan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan program ini adalah dilakukan *medical check up* kepada seluruh mahasiswa kelas 10. Tujuan program ini diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan perilaku hidup sehat di sekolah maupun di rumah. Anggaran kesehatan memiliki hubungan erat dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk membagi ilmu dalam bidang kesehatan maupun lainnya. Maka dari itu, dalam perencanaan anggaran kesehatan harus dikelola dengan baik dan dialokasikan terhadap kebutuhan dasar yang sifatnya *daruriyyah*.

Pemanfaatan lain dari anggaran kesehatan yaitu pemeliharaan keturunan. Setiap negara pasti ingin memiliki generasi yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terdapat *index* menjaga keturunan yaitu *index an Nasl*. *Index an Nasl* sangat berkaitan dengan kesehatan, karena pelaksanaan dari indikator *index an Nasl* dihitung berdasarkan angka kelahiran total dan angka kelahiran bayi. Anggaran kesehatan disini berperan penting karena pada realisasinya harus sesuai dengan *index an Nasl*. Adapun peran anggaran kesehatan disini adalah terlaksananya program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh

pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menekan angka kelahiran total. Hal ini cukup berhasil, dibuktikan dengan adanya penurunan angka kelahiran total di tahun 2019.

Index terakhir dari *Islamic Human Development Index* (I-HDI) adalah *index al Maal*. *Index* adalah menjaga harta, sehingga *index* ini termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, setiap manusia memerlukan upaya untuk mendapatkan harta dengan kondisi yang sehat. Karena dalam proses pencarian harta, dibutuhkan usaha yang banyak sehingga hal ini berhubungan dengan kesehatan. Ketika seseorang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan itu disebabkan karena tidak tercukupinya pemenuhan hal *daruriyyah* dalam hal ini yaitu menjaga harta. Setiap masing-masing *index* pada *Islamic Human Development Index* (I-HDI) saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Dari kelima *index* tersebut sangat sulit dipisahkan dalam implementasi anggaran kesehatan. Karena antara implementasi anggaran kesehatan dengan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) saling berkaitan, maka bidang kesehatanpun dijadikan sebagai salah satu indikator penghitungan I-HDI.

D. Anggaran Bidang Pendidikan Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Sebagai sarana mencari ilmu, pendidikan sangat dibutuhkan dalam melengkapi kehidupan. Pendidikan, seyogyanya mampu mengantarkan umat manusia menuju kemaslahatan untuk mencapai falah di dunia maupun di akhirat. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sebagai pengukur kesejahteraan manusia secara islami tak luput meninggalkan eksistensi dari pendidikan. Bahkan, pendidikan di dalam I-HDI memiliki porsi tersendiri pada *index al 'aql*. Maka dari itu, pada sub-bab ini akan dijabarkan mengenai implementasi anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimanfaatkan pada pengelolaan program pendidikan melalui perspektif I-HDI. Berikut adalah anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019:

Tabel 4. 14 Jumlah anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar)

2015	2016	2017	2018	2019
111.306.344.9	140.340.660.9	524.211.687.	564.347.307.2	651.798.397.7
89,56	39,03	440,6	96,54	81,07

Sumber: Lampiran 5, diolah.

Berdasarkan tabel 4. 14 disimpulkan bahwa jumlah anggaran pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah anggaran pendidikan tertinggi diduduki oleh tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.651.798.397.781,07. Anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2017 hingga 2019. Anggaran tersebut diambil berdasarkan kegiatan atau bidang yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama lima tahun. Anggaran pendidikan yang diambil pun berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan konsep *Islamic Human Development Index* yang terbagi menjadi 5 dimensi, anggaran pendidikan memiliki perannya pada masing-masing *index* pada I-HDI. Eksistensi dari anggaran pendidikan harus digunakan dan dirancang dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat karena pendidikan adalah salah satu dasar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Pendidikan bersifat *daruriyyah* begitupun dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan memiliki peran sebagai fasilitator kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bidang pendidikan. Dalam *index ad Dien*, implementasi dari pendidikan seperti mempelajari, memahami dan mengamalkan aqidah, ilmu islam dan seluruh jagat raya didunia ini. Untuk pelaksanaan program pendidikan yang berkaitan dengan *ad Dien*, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan program One Day One Juz, adapun

kegiatan yang dilaksanakan adalah semua siswa yang beragama Islam diwajibkan membaca Al-Qur'an hingga khatam dalam beberapa kurun waktu. Jika dilihat, program ini sangat bagus karena memiliki dua aspek penting yaitu aspek agama dan aspek pendidikan. Untuk pendidikan sendiri membaca Al-Qur'an dapat melatih kefasihan dalam membacanya, untuk aspek agama ini adalah sebuah bentuk pengamalan aqidah. Sehingga dalam pembentukan atau perancangan anggaran pendidikan harus dibuat serinci mungkin sesuai kebutuhan.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan *index an Nafs*, *index an Nafs* merupakan *index* yang diukur menggunakan indikator yg berhubungan dengan kesehatan yaitu angka harapan hidup. Dalam hal ini, implementasi dari *an Nafs* adalah dengan cara menjaga kesehatan secara fisik maupun psikis. Ketika seseorang menjaga kesehatannya berarti ia sudah menerapkan ilmu pengetahuannya didalam kehidupan. Penerapan anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terjalinya program Usaha Kesehatan Sekolah dengan Puskesmas setempat untuk membina dan mengembangkan penerapan hidup sehat secara terpadu melalui program pendidikan. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari anggaran pendidikan yang dialokasikan terhadap kesehatan.

Selanjutnya adalah *index al' aql*, *index* ini diukur menggunakan indikator yang berhubungan dengan pendidikan yaitu data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019. Implementasi dari anggaran pendidikan adalah terdapat program-program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya adalah program Wajib Belajar 12 tahun. Program ini dibuat untuk para siswa siswi dalam melaksanakan pendidikannya selama 12 tahun. Menurut pemerintah program ini sangat wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan pendidikan nasional adalah dapat mengembangkan potensi siswa dan siswi supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berilmu, menjadi generasi bangsa yang

demokratis serta tanggungjawab. Jadi, anggaran pendidikan sangat menopang kelancaran kegiatan pendidikan.

Index an Nasl merupakan *index* dari dimensi *hifzu an Nasl* yang berarti menjaga keturunan. Untuk mengukur *index* ini dibutuhkan indikator angka kelahiran total dan angka kematian bayi. Sejauh ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menekan angka kelahiran total menjadi 2.05% pada tahun 2019 sedangkan untuk angka kematian bayi mampu dikurangi menjadi 78 jiwa pada tahun 2019. Keberhasilan ini tentunya atas campur tangan pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada program yang ditujukan untuk indikator *an Nafs*. Program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbentuk penyuluhan Cegah Seks Bebas yang diselenggarakan di beberapa sekolah tingkat atas. Penyuluhan tersebut memiliki tujuan untuk mencegah seks bebas yang akan berdampak pada hamil diluar nikah. Dari penyuluhan tersebut terlihat antara anggaran pendidikan dan *index an Nasl* dapat bersinergi dengan baik.

Index al Maal adalah *index* terakhir pada *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang berarti menjaga harta. Untuk mengukur *index al Maal* dibutuhkan indikator pengeluaran perkapita selama sebulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp.1.509.974. Hal ini sangat baik karena telah melewati batas maksimal yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik nasional. Harta dapat mencakup semua hal termasuk pendidikan, dengan harta bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi memiliki peluang kerja yang baik. Sehingga dapat mendapatkan kehidupan yang baik pula. Dalam menciptakan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak daerah setempat dengan beberapa kualifikasi yang telah ditentukan. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala dengan biaya. Maka dari itu, peran

anggaran pendidikan telah memfasilitasi *index al Maal* sehingga tercapainya pendidikan yang baik.

E. Anggaran Bidang Ekonomi Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena menyangkut semua aspek kehidupan. Jika pada aspek ekonomi tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keberlanjutan aspek lainnya. Ekonomi selalu mendapat perhatian khusus tidak hanya terhadap individu, namun juga terhadap negara. Hingga saat ini, suatu daerah maupun negara masih memiliki tugas yang sangat berhubungan dengan ekonomi. Dalam *Islamic Human Development Index* (I-HDI) ekonomi memiliki hubungan erat dengan salah satu indexnya yaitu *index al Maal*. Alasan keterkaitan tersebut adalah karena *al Maal* diartikan sebagai menjaga harta, yang mana harta hasil akhirnya termasuk dalam bidang ekonomi. Karena pentingnya ekonomi disuatu daerah maupun negara maka dari itu ekonomi memiliki porsi anggaran bidangnya, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah anggaran ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019

Tabel 4. 15 Jumlah Anggaran Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar)

2015	2016	2017	2018	2019
154.621.566. 777	171.609.534.82 3,09	161.745.831.14 9,14	161.756.642.4 00,5	183.083.811.35 2,35

Sumber: Lampiran 5 (diolah)

Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah anggaran ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Jumlah anggaran ekonomi tertinggi diduduki oleh tahun 2019 dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 183.083.811.352,35 sedangkan jumlah anggaran ekonomi paling rendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 154.621.566.777. Anggaran tersebut diambil berdasarkan kegiatan atau bidang yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan, Inspektorat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran ekonomi yang diambil pun berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.

Ekonomi mencakup semua aspek, maka dari itu dibutuhkan sarana yang tepat untuk mewujudkan kegiatan yang menyangkut bidang ekonomi. Dalam *Islamic Human Development Index* (I-HDI), ekonomi memiliki porsi pada *index al Maal* yang dihitung berdasarkan indikator pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu *index* yang berhubungan dengan anggaran ekonomi adalah *index ad Dien*. Jika dilihat dari arti *ad Dien* adalah menjaga agama, maka dapat berkaitan dengan ekonomi. Contoh implementasi anggaran ekonomi menurut perspektif *ad Dien* yaitu program menuju wisata halal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gencar menjalankan program pariwisata halal karena potensi wisatanya yang banyak. Pemerintah menyebutkan program ini akan memudahkan pengunjung untuk melakukan ibadahnya jika berada ditempat wisata serta menarik minat pengunjung. Sehingga, ketika pengunjung tertarik maka jumlah angka pengunjung akan naik dan pendapatan tersebut dapat dikelola lagi untuk pemanfaatan wisata lainnya yang belum dikelola secara baik. Dalam hal ini, peran anggaran ekonomi disini adalah sebagai sarana pembangunan wisata halal sedangkan untuk *ad Dien* sebagai perumus konsep harus seperti apa penyediaan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Islamic Human Development Index (I-HDI) memiliki dua *index* yang sama-sama berhubungan dengan bidang kesehatan, yaitu ideks *an Nafs* dan *index an Nasl*. Dari kedua *index* tersebut dihitung berdasarkan indikator yang juga berhubungan

dengan kesehatan diantaranya adalah *an Nafs* dihitung dengan data angka harapan hidup, *an Nasl* dihitung dengan data angka kelahiran total dan angka kematian bayi.

Sebagai aspek penyedia sarana dan prasarana, anggaran ekonomi tentu memiliki peran terhadap index *an Nafs* dan *an Nasl*. Salah satu program pemerintah daerah yang memiliki basis di bidang kesehatan maupun ekonomi adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS merupakan program yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai asuransi terjangkau yang telah disubsidikan oleh pemerintah. BPJS dapat dijadikan asuransi untuk kebutuhan dibidang kesehatan seperti rawat inap, operasi, kelahiran serta banyak lainnya yang disediakan oleh BPJS. Maka dari itu, anggaran ekonomi bisa menopang kehidupan untuk bidang kesehatan.

Index dari *Islamic Human Development Index* (I-HDI) selanjutnya adalah *al 'aql*. Dalam I-HDI *index al 'aql* diberi porsi untuk bidang pendidikan, indikator untuk menghitung *index* ini adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sejauh ini, pendidikan menjadi dasar kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan, kita mengetahui bagaimana manusia bereproduksi, menjaga kesehatan, bekerja dan bagaimana mendapatkan hidup yang layak. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak maka dibutuhkan upaya untuk membuka peluang besar dalam bekerja. Dalam hal ini, anggaran ekonomi tentunya dapat menopang kebutuhan pendidikan. Salah satu implementasi anggaran ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang pendidikan adalah mengenai penyuluhan UMKM kepada masyarakat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyuluhan ini bertujuan supaya masyarakat yang baru ingin mulai berdagang atau sudah memiliki UMKM dapat termotivasi untuk menjalani usaha tersebut. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam membangun usaha. Hal ini membuktikan bahwa anggaran ekonomi sangat berperan bagi pendidikan, mereka saling terintegrasi antara satu dengan lainnya.

Index terakhir adalah *al Maal* yang berarti menjaga harta. *Index* ini sangat berhubungan dengan ekonomi karena berurusan dengan harta (kepemilikan). *Index al Maal* dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita selama sebulan penduduk Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 hingga 2019. Anggaran ekonomi dalam hal ini sangat berpengaruh untuk jalannya kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implementasi anggaran ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi antara lain adanya Bantuan UMKM, pemberian lahan UMKM untuk penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dari implementasi anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi perspektif *Islamic Human Development Index*. Berikut merupakan tabel jumlah keseluruhan anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi:

Tabel 4. 16 Jumlah anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 (dalam milyar)

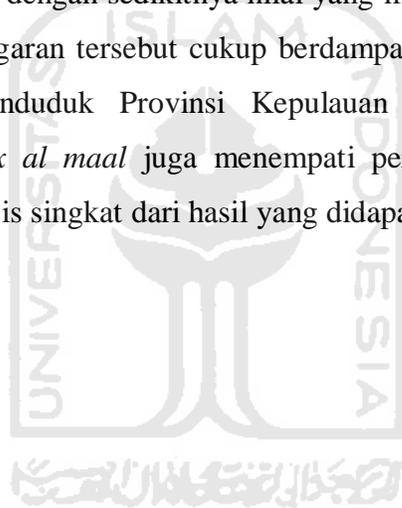
Anggara	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Kesehatan	Rp. 166.596.806.579,33	238.189.980.181,66	280.604.880.736,9	302.270.878.221,9	298.625.776.309,97	1.286.288.322.029,7
Pendidikan	111.306.344.989,56	140.340.660.939,03	524.211.687.440,6	564.347.307.296,54	651.798.397.781,07	1.992.004.398.446,7
Ekonomi	154.621.566.777	171.609.534.823,09	161.745.831.149,14	161.756.642.400,5	183.083.811.352,35	832.817.386.502,08

Sumber: Lampiran 5 (diolah)

Dari tabel 4. 16 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat memprioritaskan anggaran pendidikan terbukti dari jumlah keseluruhan anggaran pendidikan dari tahun 2015-2019. Namun, dilihat dari hasil *index al 'aql* pada penghitungan I-HDI selama 2015-2018 *index al 'aql* menduduki posisi paling akhir

dibandingkan *index* lainnya. Hal ini menjadi tugas pemerintah, mengapa dana alokasi untuk pendidikan tidak sebanding dengan nilai *index* lainnya yang anggarannya lebih sedikit.

Kemudian anggaran prioritas lainnya, yaitu dana kesehatan. Pada implementasinya, dana kesehatan mampu membawa nilai *index an Nafs* pada posisi ke empat sementara itu mampu membawa nilai *index an Nasl* pada posisi menurun dari tahun ketahun dalam hitungan *index* I-HDI. Hal ini cukup seimbang melihat rendahnya nilai *index an Nasl* dari tahun ketahun, tetapi tidak dengan *index an Nafs* yang menduduki posisi ke empat dengan sedikitnya nilai yang meningkat. Untuk anggaran ekonomi, pemanfaatan anggaran tersebut cukup berdampak dengan tingginya angka pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penghitungan I-HDI, *index al maal* juga menempati peringkat teratas dari *index* lainnya. Berikut tabel analisis singkat dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini.



Tabel 4. 17 Analisis Anggaran Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Perspektif I-HDI
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Anggaran 2015-2019	Rata-rata <i>index</i> tahun 2015-2019	Analisis
Anggaran Pendidikan Rp. 1.992.004.398.446,7	<i>Index ad Dien</i> 0.628	Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan mengalami ketimpangan antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat.
	<i>Index al 'aql</i> 0.531	Anggaran pendidikan merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan daripada anggaran kesehatan dan ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai <i>index al aql</i> lebih tinggi dari <i>index</i> lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir hal ini tidak sebanding dengan dana yang telah dilokasikan.
Anggaran Kesehatan Rp. 1.286.288.322.029,7	<i>Index an Nafs</i> 0.759	Jumlah anggaran kesehatan menduduki peringkat kedua untuk pengalokasian dana, tetapi belum mampu membawa nilai <i>index an Nafs</i> lebih tinggi, bahkan selama tahun 2015-2019 <i>index an Nafs</i> hanya mampu meningkat tidak lebih dari 0.10.
	<i>Index an Nasl</i> 1.873	Besarnya anggaran kesehatan sudah mampu untuk menurunkan angka <i>index an Nasl</i> yang mana hal ini cukup baik karena implementasi praktiknya dapat menekan angka kematian bayi dan angka kelahiran total.
Anggaran Ekonomi Rp. 832.817.386.502,8	<i>Index al Maal</i> 2.67	Besarnya anggaran ekonomi yang telah digelontorkan, mampu berdampak pada pemanfaatan anggaran dibuktikan dengan tingginya angka pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penghitungan I-HDI, <i>index al maal</i> juga menempati peringkat teratas dari <i>index</i> lainnya

F. Keterkaitan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Dalam penggunaan masing-masing indikator, pada *index ad dien* penyusun menggunakan rasio zakat yang terdiri dari data penerimaan dan pendistribusian zakat. Penggunaan indikator tersebut dikarenakan adanya hubungan antara agama islam dengan implementasi ajaran islam yang dilakukan oleh masyarakat. Rasio zakat juga dapat digunakan sebagai representasi pengamalan ibadah serta implementasi perbuatan baik sesama manusia dengan cara membantu antara satu dengan lainnya. Rata-rata *index ad dien* selama lima tahun berturut-turut adalah sebesar 0.628. *Index ad dien* dalam implementasinya juga berhubungan dengan anggaran pendidikan. Namun, besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan mengalami ketimpangan antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat. Idealnya dalam penggunaan indikator rasio zakat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama dan Yusuf (2019) yang menyebutkan bahwa penelitian harus memiliki indikator yang mana dapat mengukur visi, komitmen serta implementasi ajaran Islam dalam masyarakat.

Index an Nafs diukur berdasarkan indikator pada Angka Harapan Hidup, penggunaan indikator tersebut dikarenakan cukup mewakili dalam mengukur *index an Nafs*. Selain itu angka harapan hidup juga dapat memproyeksikan rata-rata tahun yang masih bisa dijalani seseorang yang berlaku pada tempat tinggal yang mereka tinggali. Angka Harapan Hidup juga digunakan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator Angka Harapan Hidup sudah sesuai standar nasional maupun internasional. Rata-rata *index an Nafs* selama lima tahun berturut-turut adalah sebesar 0.759. Jumlah anggaran kesehatan menduduki peringkat kedua untuk pengalokasian dana, tetapi belum mampu membawa nilai *index an Nafs* lebih tinggi, bahkan selama tahun 2015-2019 *index an Nafs* hanya mampu meningkat tidak lebih dari 0.10. Dalam penggunaan indikator tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Hendri Anto (2011) yang menyebutkan bahwa *index an Nafs* diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup.

Indikator pada *index al 'aql* yaitu menggunakan data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penggunaan indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional maupun internasional karena Indeks Pembangunan Manusia yang diusung oleh UNDP juga menggunakan data tersebut, sehingga penggunaan indikator tersebut sangat tepat. Kemudian, rata-rata lama sekolah dapat merepresentasikan bagaimana Sumber Daya Manusia di daerah tersebut dan untuk indikator harapan lama sekolah dapat dijadikan sebagai manifestasi pencapaian suatu daerah serta digunakan untuk bahan evaluasi atau inisiasi kedepannya harus seperti apa. Rata-rata *index al 'aql* adalah 0.531. Anggaran pendidikan merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan daripada anggaran kesehatan dan ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai *index al aql* lebih tinggi dari *index* lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir hal ini tidak sebanding dengan dana yang telah dilokasikan. Anggaran pendidikan merupakan anggaran terbesar yang dialokasikan daripada anggaran kesehatan dan ekonomi. Tetapi tidak mampu membawa nilai *index al aql* lebih tinggi dari *index* lainnya. Dengan rata-rata 0.531 selama lima tahun terakhir hal ini tidak sebanding dengan dana yang telah dilokasikan.

Indikator pada *index an Nasl* yaitu menggunakan indikator dari data Angka Kematian Bayi dan Angka Kelahiran Total. Secara bahasa *hifdzu an Nasl* adalah menjaga keturunan, maka indikator tersebut sangat tepat jika diaplikasikan pada *index an Nasl*. Penggunaan data Angka Kematian Bayi pada *index an Nasl* dapat dijadikan sebagai evaluasi suatu daerah untuk meminimalisir segala penyebab yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian bayi. Untuk Angka Kelahiran Total juga dapat dijadikan gambaran suatu daerah untuk dapat mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan ketika angka kelahiran total naik maupun turun.

Indikator pada *index al maal* yaitu menggunakan indikator dari data pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita sudah cukup mewakili dimensi *hifdzu al Maal* karena indikator ini dihitung sebagai standar hidup layak. Selain itu, pengeluaran perkapita juga digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia yang diusulkan oleh UNDP, sehingga indikator ini sudah sesuai standar layak nasional maupun internasional.



BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari seluruh hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak semua anggaran bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi digunakan untuk semua program yang menyangkut *index* yang terdapat pada *Islamic Human Development Index* (I-HDI), karena luasnya bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang tidak selalu menyangkut aspek *index* I-HDI. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis. Maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Anggaran bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan *index* yang terdapat pada *Islamic Human Development* (I-HDI). Indikator I-HDI yang sangat memiliki keterkaitan erat adalah *index an Nafs* dan *index an Nasl*. Dalam realisasi anggarannya terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah dana yang dialokasikan pada bidang kesehatan dengan indikator yang dihasilkan *Index an Nafs*.
2. Anggaran bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan *index* yang terdapat pada *Islamic Human Development* (I-HDI). Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa yang dialokasikan pada bidang pendidikan adalah dana terbesar daripada dua anggaran lainnya, yaitu anggaran kesehatan dan anggaran ekonomi. Namun, hasil dari indikator I-HDI tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan. Selama lima tahun berturut-turut, *index al aql* menempati posisi terakhir dari semua *index* lainnya. Dalam hal ini, terjadi ketimpangan antara jumlah dana anggaran pendidikan dengan hasil *index al aql* pada I-HDI. Untuk *index ad dien*, juga mengalami hal yang sama. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nyatanya belum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan zakat. Sehingga rasio zakat yang dihasilkan mengalami ketimpangan antara dana penghimpunan dan pendistribusian zakat.

3. Anggaran bidang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 dialokasikan kepada beberapa program yang berhubungan dengan *index* yang terdapat pada *Islamic Human Development (I-HDI)*. Pada penelitian ini, dana yang dialokasikan untuk anggaran ekonomi adalah yang terkecil dibandingkan dengan anggaran lainnya, yaitu anggaran kesehatan dan pendidikan. Tetapi, pemanfaatan anggaran sudah dilakukan dengan cukup baik. Telah dibuktikan dengan tingginya angka pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penghitungan I-HDI, *index al maal* juga menempati peringkat teratas dari *index* lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya perbaikan dalam pemanfaatan anggaran pendidikan supaya tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara besarnya alokasi dana dan hasil dari indikator I-HDI.
2. Menambah program-program yang berkaitan dengan *index al 'aql*. Sebagai *index* yang memiliki hasil terkecil dibandingkan indikator lainnya, maka ada baiknya antara pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu untuk menjalankan pendidikan dan mencukupi fasilitas pendidikan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Andriana. (2008). *Pemodelan Anggaran dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- Anto, M. H. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *IDEAS*, 69-95.
- Ariza, A. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 1-21.
- babelprov. (2020, September 12). *Aspek Geografis*. Retrieved from babelprov.go.id: <https://www.babelprov.go.id/content/aspek-geografis>
- Babelprov. (2020, September 12). *Belitung Masih Menjadi Tujuan Wisata Unggulan*. Retrieved from babelprov.go.id: <https://www.babelprov.go.id/content/belitung-masih-menjadi-tujuan-wisata-unggulan>
- Babelprov. (2020, September 12). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from babelprov.go.id: www.babelprov.go.id/bank_data
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*.
- Badan Pusat Statistik. (2019, April 22). *Infografis Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2019*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html>

- BAKUDA. (2020, September 12). *Potensi Daerah Bangka Belitung*. Retrieved from Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <http://bakuda.babelprov.go.id/content/potensi-daerah-bangka-belitung>
- baznasbabel. (2019). *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Bangka Belitung*. Pangkalpinang: baznasbabel.com.
- BPS. (2020, Agustus 6). *Angka Harapan Hidup menurut Provinsi dan Jenis Kelamin*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1114>
- BPS Babel. (2020, July 6). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <https://babel.bps.go.id/quickMap.html>
- BPS Babel. (2020, September 13). *Oktober 2019, Kunjungan Tamu ke Bangka Belitung Mencapai 44.603 Kunjungan*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <https://babel.bps.go.id/pressrelease/2019/12/02/624/oktober-2019--kunjungan-tamu-ke-bangka-belitung-mencapai-44-603-kunjungan.html>
- BPS Indonesia. (2020, Juni 23). *Angka Harapan Hidup di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1114>
- BPS Indonesia. (2020, Agustus 1). *Harapan Lama Sekolah pada Provinsi di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1299/harapan-lama-sekolah-menurut-provinsi-2010-2017.html>
- Bukhari, A. (2018). Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi. *Islamuna Jurnal Studi Islam*, 1-11.
- Daerah, P. (2019). *Profil Provinsi Bangka Belitung*. Pangkalpinang: babelprov.go.id.

- Duli, N. (2019). *Metedologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Sleman: Deepublish.
- Effendy, O. U. (2007). *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Gani, I. &. (2015). *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Ghazali, e. a. (2014). Integrating Knowledge with Science and Religion. *The 1st ASIK* (p. 120). Johor Baru: Ibnu Sina Institutes for Fundamental Science Studies Universiti Teknologi Malaysia.
- Hajrina, N., & Jatmiko, W. (2015). Between Sharia Maqasid Index and Human Development Index: Which One is Happier? *Media Syariah*, 335-372.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanief, Y. N., & Himawanto, W. (2017). *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Harinaldi. (2005). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan Alwi, d. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Hermawan, I. (2019). *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hidayah, M. (2020, Juni 7). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar*. Retrieved from digilib.uin-suka: http://digilib.uin-suka.ac.id/12480031_BAB-II_sampai_SEBELUMBABTERAKHIR.pdf

- Ibrahim, P. B. (2006). Sustainable Economics Development Concept, Principles and Management from Islamic Perspective. *European Journal of Social Science*, 836-863.
- Ismayani, A. (2017). *Metodologi Penelitian*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Kasmadi & Sarinah, N. S. (2013). *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Katmas, E. (2018). *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kemenag. (2018, July 4). *Data Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018*. Retrieved from Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: babel.kemenag.go.id
- kemenpppa. (2020, Oktober 3). *SINERGI MASYARAKAT PERKUAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK*. Retrieved from kemenpppa.go.id:
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2362/sinerji-masyarakat-perkuat-kesejahteraan-perempuan-dan-anak>
- KESBANGPOL. (2020, April 28). *Potensi Daerah*. Retrieved from Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung: <http://kesbangpol.babelprov.go.id/content/potensi-daerah>
- Larassita, Y. F., Istiyani, N., & Jumiati, A. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*, 1-4.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muninjaya, G. (2003). *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Buku ajar praktis cara membuat*. Bandung: PT. Panca Terra Firma.
- P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Raja Grafindo.
- Purwoto, A. (2007). *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.
- Rafsanjani, H. (2014). Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia. *Tesis UNAIR Surabaya*.
- Rama, A. d. (2019). Construction of Islamic Human Development Index. *JKAU: Islamic Economy*, 43-55.
- Reza, M., Dharma, Y., & Juliansyah, H. (2018). The Effect of Islamic Human Development Index on Poverty Level in Bireuen District Period 2000-2017. *Journal of Malikusseh Public Economics* , 35-43.
- Riyanto, S. &. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepublish.
- Rukiah, & Siregar, S. (2019). Interactions and Contributions Between Islamic Human Development Index, Economics Growth, Fiscal Policy and Demographics In Indonesian Provinces: Panel Vector Autoregression (P-Var) Analisis. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* (pp. 327-367). Medan: jurnal.umsu.ac.id.
- Rukiah, e. (2019). Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah). *Istinbath*, 308-327.

- Santoso, S. (2006). *Menggunakan SPSS untuk Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, S. (2010). *Statistika Parametrik: Konsep dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, S. (2018). *Menguasai SPSS Versi 25*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 1-12.
- Septiarani, M. M., & Herianingrum, S. (2017). Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 381-395.
- Situmorang, S. H. (2010). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sunjoyo, e. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (2016). *Human Development Report*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2019). *Human Development Report 2019*. hdr.undp.org.
- Unit Advisory Ekonomi, P. K. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Lampiran

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019

Indeks Pembangunan Manusia 2014-2016

[← back](#)
[📄 xlsx](#)

Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : [2017-2019](#) [2014-2016](#) [2011-2013](#) [2010-2010](#)

Search:

Wilayah Babel	Indeks Pembangunan Manusia		
	2016 ↑	2015 ↑	2014 ↑
Kepulauan Bangka Belitung	69,55	69,05	68,27
Bangka	70,43	70,03	69,79
Belitung	70,81	70,29	69,56
Bangka Barat	67,60	67,23	66,43
Bangka Tengah	68,76	68,66	68,09
Bangka Selatan	64,57	63,89	63,54
Belitung Timur	69,30	68,83	68,10
Kota Pangkalpinang	76,73	76,61	76,28
Indeks Pembangunan Manusia			

Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019

[← back](#)
[📄 xlsx](#)

Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : [2017-2019](#) [2014-2016](#) [2011-2013](#) [2010-2010](#)

Search:

Wilayah Babel	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019 ↑	2018 ↑	2017 ↑
Kepulauan Bangka Belitung	71,30	70,67	69,99
Bangka	72,39	71,80	71,09
Belitung	72,46	71,70	70,93
Bangka Barat	69,05	68,68	67,94
Bangka Tengah	70,33	69,52	68,99
Bangka Selatan	66,54	65,98	65,02
Belitung Timur	70,84	70,22	69,57
Kota Pangkalpinang	77,97	77,43	76,86
Indeks Pembangunan Manusia			

LAMPIRAN 2

Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | exportPDF.php | angka harapan hidup provinsi di Kepulauan Bangka Belitung | Pembangunan Manusia | Kep. Ba. | +

bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php

Provinsi	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)		Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun)	
	Laki-laki	Perempuan																		
ACEH	67.17	71.09	67.25	71.16	67.32	71.22	67.40	71.30	67.44	71.34	67.59	71.49	67.61	71.52	67.62	71.55	67.73	71.67	67.98	71.85
SUMATERA UTARA	65.59	69.43	65.76	69.61	65.93	69.78	66.06	69.91	66.16	70.01	66.41	70.26	66.48	70.29	66.49	70.29	66.73	70.32	67.07	70.92
SUMATERA BARAT	65.70	69.58	65.90	69.78	66.11	69.99	66.31	70.20	66.41	70.31	66.75	70.65	66.90	70.65	66.94	70.70	67.16	70.93	67.42	71.29
RIAU	68.35	72.14	68.43	72.30	68.63	72.45	68.79	72.64	68.85	72.73	69.05	72.90	69.10	72.95	69.12	72.92	69.32	73.12	69.62	73.43
JAMBI	67.99	71.88	68.14	72.03	68.30	72.18	68.46	72.33	68.54	72.41	68.67	72.54	68.69	72.62	68.75	72.67	68.89	72.80	69.11	72.97
SUMATERA SELATAN	66.43	70.34	66.62	70.49	66.79	70.64	66.93	70.83	67.01	70.91	67.25	71.13	67.28	71.16	67.29	71.17	67.52	71.40	67.79	71.63
BENGKULU	65.92	69.81	66.08	69.98	66.26	70.16	66.43	70.32	66.47	70.35	66.60	70.48	66.62	70.49	66.64	70.51	66.89	70.76	67.28	71.13
LAMPUNG	67.61	70.96	67.23	71.10	67.43	71.31	67.66	71.53	67.76	71.61	68.00	71.86	68.02	71.90	68.04	71.91	68.27	72.14	68.64	72.40
KEP. BANGKA BELITUNG	67.25	71.14	67.42	71.30	67.60	71.45	67.77	71.61	67.85	71.69	68.01	71.85	68.05	71.88	68.08	71.89	68.32	72.11	68.63	72.46
KEP. RIAU	66.54	70.39	66.74	70.54	66.90	70.81	67.10	71.02	67.28	71.12	67.54	71.34	67.59	71.39	67.66	71.40	67.76	71.56	67.92	71.51
DKI JAKARTA	69.86	73.65	70.02	73.80	70.19	73.96	70.36	74.12	70.44	74.20	70.60	74.36	70.72	74.41	70.78	74.41	70.87	74.56	70.96	74.68
JAWA BARAT	69.40	73.27	69.68	73.53	69.95	73.79	70.22	74.05	70.35	74.18	70.54	74.36	70.57	74.35	70.58	74.42	70.76	74.62	71.03	74.83
JAWA TENGAH	70.80	74.75	70.99	74.92	71.18	75.10	71.37	75.28	71.97	75.87	72.05	75.95	72.10	75.99	72.16	76.02	72.28	76.10	72.33	76.16

18:43 08/10/2020

LAMPIRAN 3

Indonesia | English

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | Informasi Publik

[IPM] Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2019

DATA SENSUS

Tabel Unduh Data

Wilayah Babel	Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kepulauan Bangka Belitung	10.70	10.79	10.96	11.18	11.60	11.71	11.83	11.87	11.94
Bangka	11.19	11.21	12.01	12.33	12.36	12.37	12.58	12.68	12.76
Belitung	10.28	10.44	10.60	10.77	11.32	11.47	11.51	11.83	11.84
Bangka Barat	10.13	10.41	10.70	10.99	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52
Bangka Tengah	10.95	11.03	11.10	11.40	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76
Bangka Selatan	9.62	9.78	10.45	10.86	10.88	11.25	11.34	11.35	11.36
Belitung Timur	10.32	10.51	10.71	10.94	11.28	11.46	11.48	11.49	11.51
Kota Pangkalpinang	12.26	12.58	12.69	12.74	12.76	12.77	12.78	12.83	12.99

Indonesia | English

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | Informasi Publik

[IPM] Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, 2010-2019

DATA SENSUS

Tabel Unduh Data

Wilayah Babel	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)								
	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kepulauan Bangka Belitung	7.19	7.25	7.32	7.35	7.46	7.62	7.78	7.84	7.98
Bangka	7.54	7.76	7.88	7.92	7.94	7.96	8.19	8.20	8.23
Belitung	7.33	7.42	8.02	8.07	8.09	8.10	8.11	8.15	8.41
Bangka Barat	6.16	6.30	6.43	6.57	6.68	6.89	7.06	7.18	7.21
Bangka Tengah	6.35	6.50	6.65	6.68	6.70	6.71	6.79	6.80	7.13
Bangka Selatan	5.39	5.44	5.83	5.87	5.88	5.96	6.12	6.36	6.42
Belitung Timur	7.24	7.51	7.83	7.89	7.91	7.95	8	8.14	8.15
Kota Pangkalpinang	9.51	9.56	9.62	9.63	9.75	9.76	9.77	9.78	9.80

LAMPIRAN 4

Penghitungan I-HDI

1. *Index ad Dien*

$$\mathbf{ID} = \frac{\mathbf{Pemanfaatan Zakat}}{\mathbf{Aktual Zakat}}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{973.486.679}{1.246.371.504} = 0.7810565918 \text{ dibulatkan menjadi } 0.78$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.455.552.138}{1.737.416.937} = 0.8377678996 \text{ dibulatkan menjadi } 0.83$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.257.724.726}{6.182.716.350} = 0.5269083266 \text{ dibulatkan menjadi } 0.52$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.563.124.114}{10.385.691.470} = 1.0170843361 \text{ dibulatkan menjadi } 1.01$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{15.034.860.361}{12.139.280.715} = 1.2385297543 \text{ dibulatkan menjadi } 1.23$$

2. *Index an Nafs*

$$\mathbf{INF} = \frac{\mathbf{AHH - Minimal AHH}}{\mathbf{Maksimal AHH - Minimal AHH}}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{69.88-20}{85-20} = 0.7673846154 \text{ dibulatkan menjadi } 0.767$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{69.92-20}{85-20} = 0.768$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{69.95-20}{85-20} = 0.7684615385 \text{ dibulatkan menjadi } 0.7684$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{70.18-20}{85-20} = 0.772$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{70.50-20}{85-20} = 0.7769230769 \text{ dibulatkan menjadi } 0.776$$

3. *Index al 'aql*

$$\mathbf{Harapan Lama Sekolah} = \frac{\mathbf{HLS - Minimal HLS}}{\mathbf{Maksimal HLS - Minimal HLS}}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{11.60-0}{15-0} = 0.7733333333 \text{ dibulatkan menjadi } 0.773$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{11.71-0}{15-0} = 0.7806666667 \text{ dibulatkan menjadi } 0.78$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{11.83-0}{15-0} = 0.7886666667 \text{ dibulatkan menjadi } 0.788$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{11.87-0}{15-0} = 0.7913333333 \text{ dibulatkan menjadi } 0.791$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{11.94-0}{15-0} = 0.796$$

$$\text{Rata-rata Lama Sekolah} = \frac{\text{RRLS}-\text{Minimal RRLS}}{\text{Maksimal RRLS}-\text{Minimal RRLS}}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{7.46-0}{18-0} = 0.4144444444 \text{ dibulatkan menjadi } 0.414$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.62-0}{18-0} = 0.4233333333 \text{ dibulatkan menjadi } 0.423$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.78-0}{18-0} = 0.4322222222 \text{ dibulatkan menjadi } 0.432$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{7.84-0}{18-0} = 0.4355555555 \text{ dibulatkan menjadi } 0.435$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{7.98-0}{18-0} = 0.4433333333 \text{ dibulatkan menjadi } 0.443$$

$$\text{IA} = \frac{1}{2} (\text{Harapan Lama Sekolah}) + \frac{1}{3} (\text{Rata-rata Lama Sekolah})$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1}{2} (0.773) + \frac{1}{3} (0.414) = 0.503$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1}{2} (0.780) + \frac{1}{3} (0.423) = 0.531$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1}{2} (0.788) + \frac{1}{3} (0.432) = 0.538$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1}{2} (0.791) + \frac{1}{3} (0.435) = 0.540$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1}{2} (0.796) + \frac{1}{3} (0.443) = 0.545$$

4. *Index an Nasl*

Angka Kelahiran Total	$= \frac{AKT - \text{Minimal } AKT}{\text{Maksimal } AKT - \text{Minimal } AKT}$
------------------------------	--

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.60 - 1.5}{2.1 - 1.5} = 1.8333333333 \text{ dibulatkan menjadi } 1.83$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.29 - 1.5}{2.1 - 1.5} = 1.3166666667 \text{ dibulatkan menjadi } 1.31$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.46 - 1.5}{2.1 - 1.5} = 1.6$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.25 - 1.5}{2.1 - 1.5} = 1.25$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.30 - 1.5}{2.1 - 1.5} = 1.3333333333 \text{ dibulatkan menjadi } 1.33$$

Angka Kematian Bayi	$= \frac{AKB - \text{Minimal } AKB}{\text{Maksimal } AKB - \text{Minimal } AKB}$
----------------------------	--

$$\text{Tahun 2015} = \frac{190 - 12}{75 - 12} = 2.82553968254 \text{ dibulatkan menjadi } 2.82$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{188 - 12}{75 - 12} = 2.7936507937 \text{ dibulatkan menjadi } 2.79$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{159 - 12}{75 - 12} = 2.3333333333 \text{ dibulatkan menjadi } 2.33$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{166 - 12}{75 - 12} = 2.4444444444 \text{ dibulatkan menjadi } 2.44$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{78 - 12}{75 - 12} = 1.0476190476 \text{ dibulatkan menjadi } 1.04$$

$$\text{INS} = \frac{1}{2} (\text{Angka Kelahiran Total} + \text{Angka Kematian Bayi})$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1}{2} (1.83 + 2.82) = 2.325$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1}{2} (1.31 + 2.79) = 2.05$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1}{2} (1.6 + 2.33) = 1.965$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1}{2} (1.25 + 2.44) = 1.845$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1}{2} (1.33 + 1.04) = 1.185$$

5. *Index al maal*

$$\text{IM} = \frac{\text{Pengeluaran Perkapita} - \text{Minimal PP}}{\text{Maksimal PP} - \text{Minimal PP}}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.118.101 - 360.000}{732.720 - 360.000} = 1.99$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.269.618 - 360.000}{732.720 - 360.000} = 2.44$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.421.624 - 360.000}{732.720 - 360.000} = 2.84$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.480.844 - 360.000}{732.720 - 360.000} = 3.00$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.509.974 - 360.000}{732.720 - 360.000} = 3.08$$

6. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

$$\text{I-HDI} = \frac{2}{6} (\text{ID}) + \frac{1}{6} (\text{INF} + \text{IA} + \text{INS} + \text{IM}) \times 100$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{2}{6} (0.78) + \frac{1}{6} (0.767+0.503+2.325+1.99) \times 100 = 119 \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{2}{6} (0.83) + \frac{1}{6} (0.768+0.531+2.05+2.44) \times 100 = 124.15 \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{2}{6} (0.52) + \frac{1}{6} (0.7684+0.538+1.965+2.84) \times 100 = 119.18 \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{2}{6} (1.01) + \frac{1}{6} (0.772+0.540+1.845+3.00) \times 100 = 136.28 \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{2}{6} (1.23) + \frac{1}{6} (0.776+0.545+1.185+3.08) \times 100 = 134.1\end{aligned}$$



LAMPIRAN 5

Halaman : 1

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.26. - PERPUSTAKAAN Organisasi : 1.26.01. - BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	11.399.875.562,40
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.950.171.312,40
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.950.171.312,40
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.449.704.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.255.960.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.193.744.250,00
	JUMLAH BELANJA	11.399.875.562,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.399.875.562,40)

Halaman : 1

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	RKA - SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26. - PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 1.26.01. - BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	16.021.641.889,41
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.420.732.889,41
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.420.732.889,41
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.600.909.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.240.157.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.976.457.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	5.384.295.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.021.641.889,41
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.021.641.889,41)

Pangkalpinang,

**Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1.26. - PERPUSTAKAAN	
ORGANISASI	:	1.26.02. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
1		2	3
		JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.		BELANJA	16.861.874.563,60
5.1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.407.482.913,60
5.1.1.		Belanja Pegawai	6.407.482.913,60
5.1.1.01.		Belanja Gaji dan Tunjangan	3.419.762.913,60

Lampiran III Peraturan Daerah
 Nomor : 15 Tahun 2017
 Tanggal : 28 December 2017

	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan	:	2.17 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN	
Organisasi	:	2.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
Sub Unit Organisasi	:	2.17.01.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH
1		2	3
2.17.2.17.01.00.00.5		BELANJA	11.661.864.297,41
2.17.2.17.01.00.00.5.1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.511.585.917,41
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1		Belanja Pegawai	6.511.585.917,41
2.17.2.17.01.01.01.5.2		BELANJA LANGSUNG	5.150.278.380,00
2.17.2.17.01.01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.386.022.040,00
		DASAR HUKUM	
		4	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	17.700.138.981,50
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.344.651.169,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.344.651.169,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.355.487.812,50
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.341.802.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.266.785.812,50
5.2.3.	BELANJA MODAL	746.900.000,00
JUMLAH BELANJA		17.700.138.981,50
SURPLUS/(DEFISIT)		(17.700.138.981,50)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	19.769.562.105,05
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.652.865.105,05
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.652.865.105,05
5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.116.697.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.295.750.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.847.772.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.973.175.000,00
JUMLAH BELANJA		19.769.562.105,05
SURPLUS/(DEFISIT)		(19.769.562.105,05)

Pangkalpinang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.995.097.352,87
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.995.097.352,87
4.1.2.	Retribusi Daerah	3.995.097.352,87
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.419.709.410,00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.419.709.410,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	575.387.942,87
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	575.387.942,87
	JUMLAH PENDAPATAN	3.995.097.352,87
5.	BELANJA	38.902.174.302,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.416.589.902,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	19.416.589.902,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.679.053.902,00

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 15 Tahun 2017

Tanggal : 28 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.03.4.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	3.995.097.352,87	
4.03.4.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.995.097.352,87	
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.995.097.352,87	
4.03.4.03.01.00.00.5	BELANJA	33.835.492.963,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.173.463.253,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	12.173.463.253,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	21.662.029.710,00	
4.03.4.03.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	9.966.208.880,00	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 4.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	18.123.648.952,94
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.628.936.992,94
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.628.936.992,94
5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.494.711.960,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.430.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.822.421.960,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.242.290.000,00
JUMLAH BELANJA		18.123.648.952,94
SURPLUS/(DEFISIT)		(18.123.648.952,94)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	16.731.445.875,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.317.301.875,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.317.301.875,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.414.144.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.564.465.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.694.549.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.155.130.000,00
JUMLAH BELANJA		16.731.445.875,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(16.731.445.875,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

PEREMINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.10.2.10.01.00.00.5	BELANJA	20.439.928.325,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.637.155.057,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.637.155.057,00	
2.10.2.10.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	13.802.773.268,00	
2.10.2.10.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.072.392.161,00	

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	16.108.519.057,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.579.362.257,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.579.362.257,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.056.658.257,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		3
4.	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000,00
5.	BELANJA	47.736.189.047,87
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.363.386.242,87
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.363.386.242,87
5.2.	BELANJA LANGSUNG	38.372.802.805,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.072.233.900,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.934.740.905,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.365.828.000,00
	JUMLAH BELANJA	47.736.189.047,87
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.636.189.047,87)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		3
4.	PENDAPATAN	230.403.831,80
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	230.403.831,80
4.1.2.	Retribusi Daerah	230.403.831,80
	JUMLAH PENDAPATAN	230.403.831,80
5.	BELANJA	63.244.142.942,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.950.217.842,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.950.217.842,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.293.925.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.813.935.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.406.344.100,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	11.073.646.000,00
	JUMLAH BELANJA	63.244.142.942,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(63.013.739.110,20)

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017				
URUSAN PEMERINTAHAN		: 1.02. - KESEHATAN		
ORGANISASI		: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		
1	2	3		
4.	PENDAPATAN DAERAH	490.807.662,00		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	490.807.662,00		
4.1.2.	Retribusi Daerah	490.807.662,00		
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	460.807.662,00		
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan kesehatan...	460.807.662,00		
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00		
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	490.807.662,00		
5.	BELANJA	51.087.879.362,00		
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.759.247.062,00		
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.759.247.062,00		
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.242.863.062,00		

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 15 Tahun 2017

Tanggal : 28 Desember 2017

		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN			
TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan		: 1.02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
Organisasi		: 1.02.01	DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi		: 1.02.01.01	DINAS KESEHATAN
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	460.807.662,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	460.807.662,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	460.807.662,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	58.839.230.494,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.788.136.486,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	14.788.136.486,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	44.051.094.008,00	
1.02.1.02.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.081.527.671,00	

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.17. - KEBUDAYAAN		
Organisasi : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	22.802.361.450,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.028.532.200,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.028.532.200,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.773.829.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.037.535.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.106.140.250,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	630.154.000,00
	JUMLAH BELANJA	22.802.361.450,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.802.361.450,00)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	RKA - SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN		
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	24.878.591.403,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.261.137.703,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.261.137.703,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.617.453.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.070.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.789.783.700,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	727.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	24.878.591.403,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.878.591.403,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017	
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN		
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	19.201.378.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.907.592.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.907.592.000,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.518.600.000,00

Lampiran III Peraturan Daerah
 Nomor : 15 Tahun 2017
 Tanggal : 28 Desember 2017

	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018		
	Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN Organisasi : 2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.16.2.16.01.00.00.5	BELANJA	27.083.526.859,00	
2.16.2.16.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.444.143.859,00	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.444.143.859,00	
2.16.2.16.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	20.639.383.000,00	
2.16.2.16.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.469.243.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.512.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.512.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	1.512.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.512.000.000,00
5.	BELANJA	26.450.313.558,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.691.324.235,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.691.324.235,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.758.989.323,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.086.330.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.866.055.400,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	806.603.923,00
	JUMLAH BELANJA	26.450.313.558,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.938.313.558,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN	2.496.421.241,68
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.496.421.241,68
4.1.2.	Retribusi Daerah	2.496.421.241,68
	JUMLAH PENDAPATAN	2.496.421.241,68
5.	BELANJA	27.362.093.477,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.115.096.977,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.115.096.977,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.246.996.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.325.290.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.512.586.500,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	409.120.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.362.093.477,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.865.672.235,32)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
 <p style="text-align: center;">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p> <p style="text-align: center;">TAHUN ANGGARAN 2017</p>		
Formulir RKA - SKPD		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. - KETENAGAKERJAAN		
ORGANISASI : 1.14.02. - DINAS TENAGA KERJA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.825.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.825.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	2.825.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.750.000.000,00
4.1.2.03.04.	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.750.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.825.000.000,00
5.	BELANJA	26.544.323.100,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.762.254.200,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	15.762.254.200,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.855.406.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
 <p style="text-align: center;">RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p> <p style="text-align: center;">TAHUN ANGGARAN 2015</p>		
Formulir DPA-SKPD		
Urusan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN		
Organisasi : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	41.280.320.042,70
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.378.694.042,70
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.378.694.042,70
5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.901.626.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.395.470.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.053.756.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	452.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	41.280.320.042,70
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41.280.320.042,70)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN		
		0,00
5.	BELANJA	62.939.419.666,57
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.949.706.666,57
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.949.706.666,57
5.2.	BELANJA LANGSUNG	54.989.713.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.361.950.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.775.543.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	4.852.220.000,00
	JUMLAH BELANJA	62.939.419.666,57
	SURPLUS/(DEFISIT)	(62.939.419.666,57)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN		
		0,00
5.	BELANJA	450.418.981.718,95
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	254.713.895.218,95
5.1.1.	Belanja Pegawai	254.713.895.218,95
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	179.740.175.218,95



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	475.321.592.205,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	232.683.220.205,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	232.683.220.205,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	242.638.372.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	21.068.276.000,00	

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015		
Formulir DPA-SKPD		
Urusan Pemerintahan : 2.07. - INDUSTRI		
Organisasi : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
4.	PENDAPATAN DAERAH	388.386.450,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	388.386.450,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	388.386.450,00
	JUMLAH PENDAPATAN	388.386.450,00
5.	BELANJA	25.554.900.891,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.705.763.291,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.705.763.291,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.849.137.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.641.195.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.846.319.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	6.361.623.600,00
	JUMLAH BELANJA	25.554.900.891,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.166.514.441,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	275.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	275.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	275.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	275.000.000,00
5.	BELANJA	23.464.869.693,41
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.177.485.993,41
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.177.485.993,41
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.692.861.993,41

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	18.837.483.849,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.798.155.849,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.798.155.849,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.039.328.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.627.300.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.544.528.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	867.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.837.483.849,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.837.483.849,00)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
ORGANISASI	: 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	21.667.860.761,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.414.469.761,20
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.414.469.761,20
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.253.391.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.864.912.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.181.979.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	206.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.667.860.761,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.667.860.761,20)

Pangkalpinang,

**Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung**

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
ORGANISASI	: 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	20.799.325.885,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.145.426.685,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.145.426.685,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.614.654.685,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.	PENDAPATAN DAERAH	57.812.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.812.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	57.812.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	57.812.500,00
5.	BELANJA	8.608.584.842,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.166.755.522,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.166.755.522,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.441.829.320,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	589.195.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.573.652.320,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	278.982.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.608.584.842,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.550.772.342,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN	65.687.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.687.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	65.687.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	65.687.500,00
5.	BELANJA	9.698.760.150,08
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.218.733.150,08
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.218.733.150,08
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.480.027.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	722.970.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.757.057.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.698.760.150,08
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.633.072.650,08)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.16. - PENANAMAN MODAL		
ORGANISASI	: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN DAERAH	190.000.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.000.000,00	
4.1.2.	Retribusi Daerah	190.000.000,00	
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	190.000.000,00	
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	75.000.000,00	
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	115.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	190.000.000,00	
5.	BELANJA	11.881.464.959,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.638.130.959,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.638.130.959,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.000.722.959,00	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
ORGANISASI	: 1.06.03. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
5.	BELANJA	24.604.822.410,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.345.890.410,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.345.890.410,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.604.178.410,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	23.099.404.647,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.779.744.847,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.779.744.847,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.319.659.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.847.680.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.549.889.800,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.922.090.000,00
JUMLAH BELANJA		23.099.404.647,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(23.099.404.647,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		3
JUMLAH PENDAPATAN		
		0,00
5.	BELANJA	25.362.906.500,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.721.455.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.721.455.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.641.451.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.022.270.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.601.701.500,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.017.480.000,00
JUMLAH BELANJA		25.362.906.500,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(25.362.906.500,00)

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	9.680.325.001,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.987.395.601,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.987.395.601,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.692.929.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	934.195.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.595.284.400,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	163.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.680.325.001,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.680.325.001,00)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	RKA - SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	10.787.327.057,99
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.803.918.757,99
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.803.918.757,99
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.983.408.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.091.880.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.793.028.300,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	98.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.787.327.057,99
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.787.327.057,99)

Pangkalpinang,

**Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak**

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
ORGANISASI	: 1.11.02. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
5.	BELANJA	13.305.375.458,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.141.827.458,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.141.827.458,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.197.315.458,00	

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015		
Urusan Pemerintahan	: 1.13. - SOSIAL		
Organisasi	: 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN	12.555.255.808,00	
5.	BELANJA	12.555.255.808,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.525.742.708,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.525.742.708,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.029.513.100,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.253.460.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.001.193.100,00	
5.2.3.	BELANJA MODAL	774.860.000,00	
	JUMLAH BELANJA	12.555.255.808,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.555.255.808,00)	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.13. - SOSIAL	
ORGANISASI	: 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	14.263.210.625,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.230.891.025,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.230.891.025,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.032.319.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.481.269.600,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.473.998.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.077.052.000,00
	JUMLAH BELANJA	14.263.210.625,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.263.210.625,00)

Pangkalpinang,

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.13. - SOSIAL	
ORGANISASI	: 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00
5.	BELANJA	15.822.560.173,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.585.514.373,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.585.514.373,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.405.154.373,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANJA	11.976.831.141,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.203.466.361,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.203.466.361,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.773.364.780,00	
1.06.1.06.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.040.655.000,00	

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	569.532.143.796,51
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	569.532.143.796,51
4.1.1.	Pajak Daerah	517.786.492.706,82
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.245.651.089,69
	JUMLAH PENDAPATAN	569.532.143.796,51
5.	BELANJA	63.981.963.826,70
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.559.919.474,70
5.1.1.	Belanja Pegawai	37.559.919.474,70
5.2.	BELANJA LANGSUNG	26.422.044.352,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.288.291.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.423.770.352,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	4.709.983.000,00
	JUMLAH BELANJA	63.981.963.826,70
	SURPLUS/(DEFISIT)	505.550.179.969,81

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN	393.922.884,12
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	393.922.884,12
4.1.2.	Retribusi Daerah	393.922.884,12
	JUMLAH PENDAPATAN	393.922.884,12
5.	BELANJA	50.196.141.595,48
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.350.191.515,48
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.350.191.515,48
5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.845.950.080,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.560.275.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.787.225.080,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	12.498.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	50.196.141.595,48
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.802.218.711,36)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	480.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	480.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	480.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00
4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	480.000.000,00
5.	BELANJA	43.852.786.916,28
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.960.618.966,28
5.1.1.	Belanja Pegawai	19.960.618.966,28
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	11.001.626.966,28

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.904.814.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.904.814.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	2.904.714.500,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.904.814.500,00
5.	BELANJA	41.083.915.071,46
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.056.005.779,46
5.1.1.	Belanja Pegawai	21.056.005.779,46
5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.027.909.292,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.754.438.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.617.624.692,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	6.655.846.600,00
	JUMLAH BELANJA	41.083.915.071,46
	SURPLUS/(DEFISIT)	(38.179.100.571,46)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		3
4.	PENDAPATAN	4.508.767.667,02
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.508.767.667,02
4.1.2.	Retribusi Daerah	7.775.894,15
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.500.991.772,87
	JUMLAH PENDAPATAN	4.508.767.667,02
5.	BELANJA	58.365.824.042,67
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.351.925.726,67
5.1.1.	Belanja Pegawai	26.351.925.726,67
5.2.	BELANJA LANGSUNG	32.013.898.316,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.795.617.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.985.616.256,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	10.232.665.060,00
	JUMLAH BELANJA	58.365.824.042,67
	SURPLUS/(DEFISIT)	(53.857.056.375,65)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
Formulir RKA - SKPD		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN		
ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
		
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN		
ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.790.945.517,72
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.790.945.517,72
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA	4.790.945.517,72
4.1.4.16.	Pendapatan dari BLUD	4.790.945.517,72
4.1.4.16.01.	Pendapatan BLUD	4.790.945.517,72
	JUMLAH PENDAPATAN	4.790.945.517,72
5.	BELANJA	61.276.737.173,90
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.121.492.673,90
5.1.1.	Belanja Pegawai	28.121.492.673,90
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.656.711.896,61

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015		
Formulir DPA-SKPD		
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN		
Organisasi : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI		
		
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN		
Organisasi : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI		
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	200.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00
5.	BELANJA	55.541.121.591,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.540.974.851,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	24.540.974.851,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	31.000.146.740,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	7.232.140.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.421.212.540,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	12.346.794.200,00
	JUMLAH BELANJA	55.541.121.591,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(55.341.121.591,00)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02. - KESEHATAN	
ORGANISASI	: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	800.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	800.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	800.000.000,00
5.	BELANJA	91.529.475.514,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.942.647.324,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	25.942.647.324,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.586.828.190,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	14.191.775.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.285.279.580,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	32.109.773.610,00
	JUMLAH BELANJA	91.529.475.514,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(90.729.475.514,00)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02. - KESEHATAN	
ORGANISASI	: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan kesehatan..	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00
5.	BELANJA	139.121.328.570,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.299.527.620,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	28.299.527.620,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.631.031.620,00

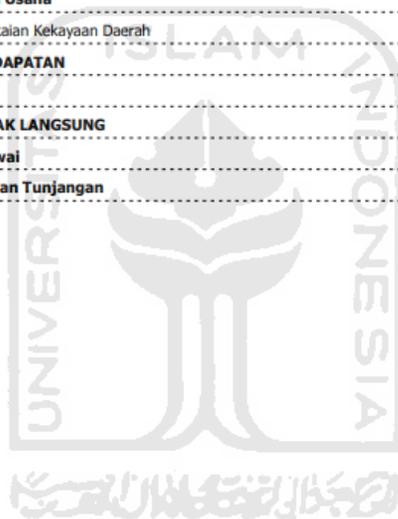
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	15.728.926.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.622.805.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.622.805.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.106.121.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	981.405.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.439.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	5.339.277.000,00
JUMLAH BELANJA		15.728.926.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(15.728.926.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	13.542.371.757,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.568.397.957,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.568.397.957,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.973.973.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.558.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.919.163.800,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	496.810.000,00
JUMLAH BELANJA		13.542.371.757,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(13.542.371.757,00)

Pangkalpinang,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
ORGANISASI	: 1.15.02. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN DAERAH	117.300.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.300.000,00	
4.1.2.	Retribusi Daerah	117.300.000,00	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	117.300.000,00	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	117.300.000,00	
5.	BELANJA	13.598.238.211,85	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.837.517.611,85	
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.837.517.611,85	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.962.509.611,85	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penyusun dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1998 sebagai anak pertama dari pasangan Lili Mintarsih dan Mujiyanto. Saat ini bertempat tinggal di JL. Diponegoro Bukit Betung, Sungailiat Bangka. Nomor HP: 081273924443. Alamat email: 16423173@students.uii.ac.id Pendidikan SMA ditempuh di SMK Negeri 1 Sungailiat, lulus pada tahun 2016 kemudian penyusun melanjutkan studi S1 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Di masa perkuliahan penyusun aktif mengikuti lomba-lomba olimpiade ekonomi islam dan kepanitiaan. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif dalam beberapa organisasi diantaranya menjadi bagian dari pengurus LEM FIAI bidang Jaringan Media, Laboratorium Mahasiswa (LabMa) divisi *Human Resources Development*.

